

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGETAHUAN

2020-2024

Volume 28, 2025



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELOUARAN

2020-2024

Volume 28, 2025

<https://jabar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT PENGELUARAN 2020-2024
Volume 28, 2025**

Katalog	: 9302020.32
ISSN	: 2655-0350
Nomor Publikasi	: 32000.25012
Ukuran Buku	: 18,2 cm x 25,7 cm
Jumlah Halaman	: xvi+144 halaman
Penyusun Naskah	: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Penyunting	: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Pembuat Kover	: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Penerbit	: ©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Dicetak oleh	: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Sumber Ilustrasi	: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

TIM PENYUSUN
Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat
Menurut Pengeluaran, 2020-2024
Volume 28, 2025

Pengarah
Dawris Sitorus, S.Si., M.Si.

Penanggung Jawab
Yuni Anggorowati, S.ST., M.A.P.

Penyunting
Yuni Anggorowati, S.ST., M.A.P.
Rendra Kurniawan S.ST., M.M.
Resty Apriani, S.Ikom
Hani Annisa Nauli Harahap, SST.
Fahmi Ali Hasymi Juliansyah S.Si, M.Sc, M.T.

Pengolah Data dan Penulis Naskah
Siswanita U., S.Si., M.T.
Ria Yunita Emkaen, S.Si., M.E.
Evi Octaviany., S.ST., M.Stat
Luthfi Fajar Arifah, S.Tr.Stat.
Ahmad Syamsul Bahri, S.A.P

Penata Letak
Singgah Satrio Prayogo, S.Kom., M.M.

KATA PENGANTAR

PDRB merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sampai saat ini, penghitungan PDRB dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sisi produksi (*production*) dan sisi pengeluaran (*expenditure*), baik untuk periode tahunan maupun triwulanan. Pendekatan *production* menjelaskan agregat PDRB yang terkait dengan penciptaan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha. Sedangkan pendekatan *expenditure* menjelaskan pengeluaran pendapatan baik untuk aktivitas konsumsi akhir dan investasi riil.

Publikasi "Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2020-2024" ini menyajikan data dan informasi PDRB dari sisi pengeluaran untuk periode tahun 2020–2024 atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dan sudah disesuaikan dengan *System of National Account 2008* (SNA 2008) yang di rekomendasikan oleh *United Nations*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan publikasi ini, semoga memberikan banyak manfaat bagi semua pengguna. Saran dan tanggapan sangat diharapkan agar publikasi ini dapat disajikan dengan lebih baik pada edisi yang akan datang.

Bandung, April 2025

Plt. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat



Darwis Sitorus, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2020-2024 Volume 28, 2025

	Hal.
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
Ringkasan Eksekutif	xv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Pengertian Pendapatan Regional.....	3
1.2 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional.....	7
Bab II Metode Estimasi dan Sumber Data.....	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT.....	14
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah.....	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
2.5 Perubahan Inventori.....	26
2.6 Ekspor Impor.....	30
Bab III Tinjauan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Berdasarkan PDRB Pengeluaran Tahun 2020-2024.....	33
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran.....	36
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga.....	46
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT.....	56
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah.....	60
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).....	67
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori.....	74
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa.....	79
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa.....	83

Hal

Bab IV Perkembangan Agregat PDDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	89
4.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran 2020-2024.....	92
4.2 Perbandingan Pengeluaran PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor.....	97
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap (PMTB).....	100
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB.....	104
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB.....	107
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor.....	110
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan.....	112
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	115
4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	118
4.10 <i>Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR)</i>	122
Bab V Penutup	129
Daftar Pustaka	133
Lampiran	135

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1	37
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020-2024 (miliar rupiah).....	
Tabel 2	39
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat 2020-2024 (miliar rupiah).....	
Tabel 3	42
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020-2024 (persen).....	
Tabel 4	43
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020-2024 (persen).....	
Tabel 5	45
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020-2024 (persen)	
Tabel 6	47
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	
Tabel 7	50
Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2020-2024 (persen).....	
Tabel 8	51
Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2020-2024 (persen).....	
Tabel 9	55
Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2020-2024 (persen).....	
Tabel 10	56
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	
Tabel 11	63
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	
Tabel 12	66
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	
Tabel 13	71
Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	
Tabel 14	75
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	

	Hal.
Tabel 15 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	81
Tabel 16 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	84
Tabel 17 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	94
Tabel 18 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2020-2024.....	99
Tabel 19 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2020-2024.....	102
Tabel 20 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	105
Tabel 21 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	108
Tabel 22 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	111
Tabel 23 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	113
Tabel 24 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	116
Tabel 25 Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Barat, 2020-2024...	120
Tabel 26 <i>Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR)</i> Provinsi Jawa Barat, 2020-2024.....	124

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020–2024 (triliun rupiah).....	41
Gambar 2 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.....	117

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.	
Lampiran 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat (juta rupiah), 2020- 2024.....	137
Lampiran 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (juta rupiah), 2020- 2024.....	138
Lampiran 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2020-2024.....	139
Lampiran 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2020-2024.....	140
Lampiran 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2020-2024.....	141
Lampiran 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2020-2024.....	142
Lampiran 7	Perkembangan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020-2024	143
Lampiran 8	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2020-2024.....	144

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian Jawa Barat selama 5 (lima) tahun terakhir, mengalami berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dinamika ini tercermin dalam komponen pengeluaran Produk Domestik Regional Bruto. Pada tahun 2020, perekonomian Jawa Barat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini berdampak signifikan pada perekonomian Jawa Barat, Penurunan aktivitas ekonomi terjadi di berbagai sektor, terutama pada konsumsi rumah tangga dan investasi, menyebabkan kontraksi ekonomi yang cukup dalam.

Sejalan dengan pemulihan pandemi di tahun 2021, secara bertahap pemulihan ekonomi terlihat seiring dengan pelonggaran pembatasan sosial dan membaiknya iklim usaha. Didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berhasil kembali mencapai laju pertumbuhan positif. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan belum kembali ke level sebelum pandemi.

Pemulihan ekonomi berlanjut di tahun 2022 dengan pertumbuhan yang lebih kuat. Didukung stabilitas harga komoditas dan permintaan global yang membaik. Konsumsi rumah tangga kembali menjadi pendorong utama, sementara investasi dan ekspor menunjukkan kinerja yang solid. Ekonomi Jawa Barat masih tumbuh di tahun 2023 meskipun menghadapi tantangan seperti tekanan inflasi, fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi global.

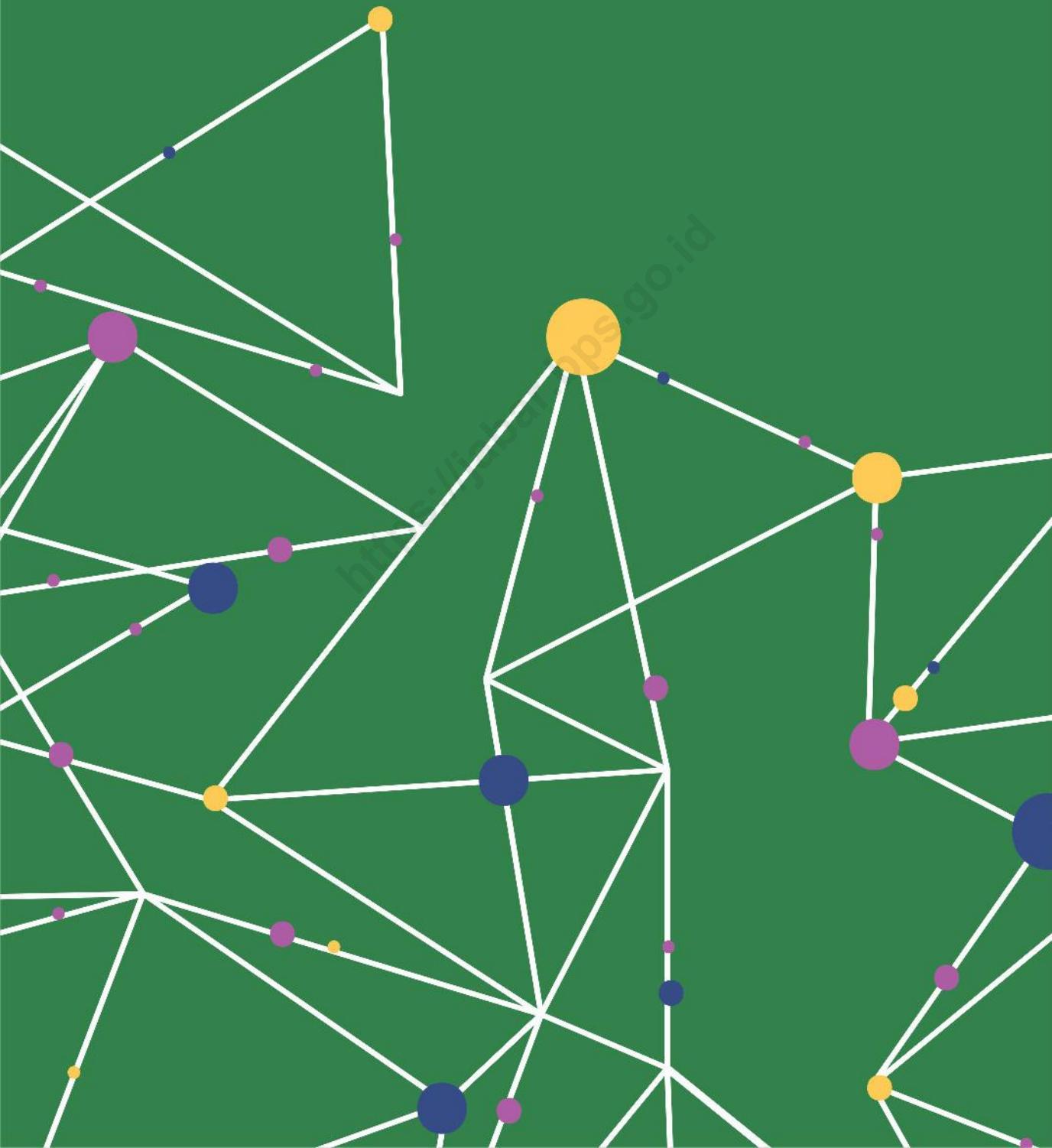
Pada tahun 2024, perekonomian Jawa Barat kembali menunjukkan pertumbuhan positif. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan berbagai komponen pengeluaran. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT),

sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB, menunjukkan pertumbuhan positif. Hal ini mencerminkan daya beli masyarakat yang masih terjaga. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) tumbuh positif didorong momentum pemilu tahun 2024. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) juga tumbuh positif seiring dengan belanja terkait pemilu dan proyek infrastruktur. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami pertumbuhan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja ekspor menunjukkan tren positif didorong oleh peningkatan permintaan global. Adapun satu-satunya komponen yang mengalami penurunan adalah perubahan inventori.

Secara keseluruhan, perekonomian Jawa Barat menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi melalui berbagai tantangan selama periode 2020 hingga 2024. Meskipun terdampak oleh pandemi pada awal periode, upaya pemulihan yang konsisten telah membawa ekonomi Jawa Barat kembali ke jalur pertumbuhan positif. Pertumbuhan ini mencerminkan kinerja positif dari berbagai sektor pengeluaran, meskipun tantangan eksternal dan domestik tetap memerlukan perhatian untuk menjaga momentum pertumbuhan di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN PENDAPATAN REGIONAL

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran moneter nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan pada periode waktu tertentu. PDRB nominal bisa menggambarkan ekonomi suatu wilayah dan bisa dibandingkan secara nasional di pasar internasional. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan PDB/PDRB sebagai ukuran agregat produksi yang sama dengan jumlah nilai kotor yang ditambahkan dari semua unit penduduk dan institusi yang terlibat dalam produksi dan jasa (ditambah pajak dikurangi subsidi). Dengan demikian PDB/PDRB adalah alat untuk mengukur nilai moneter akhir barang dan jasa yang dibeli oleh pengguna akhir dan diproduksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan SNA 2008, pengertian PDB/PDRB merupakan konsep nilai tambah yang diperoleh dari selisih antara output dengan konsumsi antara yaitu jumlah nilai tambah bruto seluruh unit produsen residen ditambah pajak atas produk kurang subsidi atas produk yang tidak termasuk di dalam penilaian output. Di sisi lain, konsep PDB/PDRB merupakan jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi nilai impor barang dan jasa. Dengan demikian PDB/PDRB

merupakan jumlah pendapatan primer yang didistribusikan oleh unit produsen residen.

Produk Domestik Neto (PDN/PDRN) diperoleh dengan mengurangkan PDB/PDRB dengan konsumsi barang modal tetap. Namun ukuran bruto (*gross*) dari produk dan pendapatan akan digunakan dengan berbagai alasan. Penyusutan aset tetap seperti yang dihitung pada akuntansi bisnis, secara umum tidak memenuhi syarat SNA. Penghitungan konsumsi barang modal tetap membutuhkan statistik dalam mengestimasi nilai stok aset tetap, usia berbagai jenis aset, pola penyusutan dan lain-lain. Tidak seluruh negara/wilayah menyusun penghitungan seperti itu, dan bila mereka melakukan mungkin berbeda metodologi (dengan menggunakan data bisnis meskipun kurang tepat). Akibatnya nilai bruto lebih sering muncul atau tersedia lebih dulu, dan secara umum lebih dapat diperbandingkan antar negara. Sehingga PDB/PDRB secara luas digunakan, meskipun menurut konsep dasar ekonomi manfaatnya lebih rendah dari PDN/PDRN. PDN/PDRN juga harus dihitung dengan mengembangkan estimasi konsumsi barang modal tetap agar dapat menjadi alat yang bermakna dalam berbagai jenis analisis.

Pendapatan primer yang tercipta dari aktivitas produksi oleh unit produsen residen, sebagian besar didistribusikan ke unit institusi residen lainnya; sedangkan sebagian lagi dapat didistribusikan ke unit nonresiden. Demikian halnya beberapa pendapatan primer yang tercipta di luar negeri, mungkin berasal dari unit residen. Hal itu mengarah pada pendefinisian dan pengukuran Pendapatan Nasional/Regional Bruto (PNB/PRB). PNB/PRB sama dengan PDB dikurangi pendapatan primer yang dibayar ke unit nonresiden, ditambah dengan pendapatan primer yang diterima dari unit nonresiden. Dengan kata lain, PNB/PRB sama dengan PDB dikurangi pajak

(kurang subsidi) atas produksi dan impor, kompensasi tenaga kerja, serta pendapatan kepemilikan yang dibayarkan ke luar negeri; ditambah pendapatan kepemilikan yang diterima dari luar negeri. Dengan demikian, PNB adalah jumlah pendapatan primer bruto yang diterima oleh unit institusi residen atau sektor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui pendapatan regional. Pendapatan regional adalah Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh residen yang tinggal di suatu daerah pada periode tertentu (www.bps.go.id). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta perubahan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit

produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Pengadaan Listrik dan Gas, 5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6) Konstruksi, 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8) Transportasi dan Pergudangan, 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10) Informasi dan Komunikasi, 11) Jasa Keuangan dan Asuransi, 12) Real Estat, 13) Jasa Perusahaan, 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15) Jasa Pendidikan, 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan 17) Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi subkategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri atas : (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

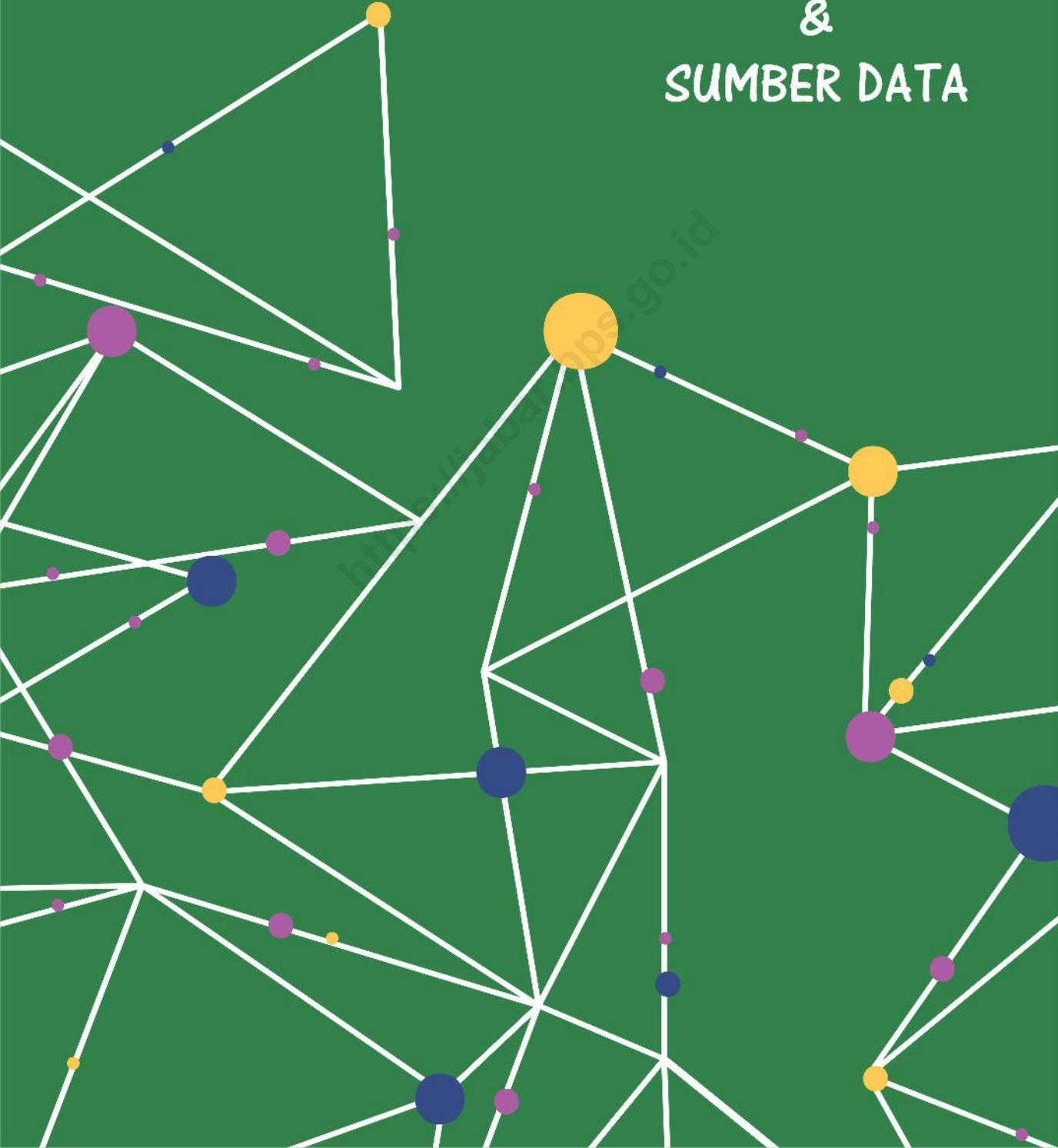
Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun, dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan data PDRB. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut kategori lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri maupun luar wilayah.

5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri serta luar wilayah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI & SUMBER DATA



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi adalah:

- Makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

- Bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- Barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- Barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- Jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dan sejenisnya), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh nonresiden diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan
- Jumlah penduduk pertengahan tahun
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Namun, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.2 PENGELOUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawahharga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan

pengurus;

- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, Organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PK-LNPRT tahunan adalah sebagai berikut:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Nonprofit (SK-LNP).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADH erlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir.

Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidentil dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditas (pendapatan jasa).

Komponen pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat

akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) Provinsi mencakup : a). PK Pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi; b). PK Pemerintah provinsi yang bersangkutan; c). PKP emerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi; d). PK Pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP provinsi tahunan adalah:

- a) Data realisasi APBN tahunan (Kemenkeu)
- b) Data realisasi APBD tahunan (Kemenkeu)
- c) Statistik keuangan daerah (BPS)
- d) Output Bank Indonesia (BI)
- e) Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta indeks harga dari BPS.

Secara umum, PKP ADH berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP ADH Berlaku} = \text{Output nonpasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **nonpasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PKP provinsi ADH berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADH konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial*

leasing) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

PMTB menggambarkan penambahan dan pengurangan barang modal yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Secara umum, barang modal dapat diklasifikasikan menurut 4 (empat) golongan, yaitu : menurut jenis barang modal, lapangan usaha, institusi, dan wilayah asal. Dalam kerangka penyusunan PDRB, PMTB dirinci menurut jenis barang modal, yaitu:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PMTB tahunan antara lain:

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin

diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

❖ Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH konstan, maka PMTB ADH berlaku tersebut di *deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

❖ Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADH berlaku maupun ADH konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADH berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADH konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH berlaku, nilai PMTB ADH konstan tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADH berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADH konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB ADH berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH konstannya diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk ADH konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH

konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADH berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini

adalah barang yang masih dalam proses penggerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Pada prinsipnya, inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi sebagai input antara atau untuk dijual tanpa mengalami proses lebih lanjut. Klasifikasi inventori dalam keperluan penghitungan

perubahan inventori dapat dibedakan atas:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;

- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

❖ Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut.

- Menghitung posisi inventori ADH konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADH konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya;
- Menghitung perubahan inventori ADH berlaku dengan meng*inflate* perubahan inventori ADH konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

❖ Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADH berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6. EKSPOR IMPOR

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah.

Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut.

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

- c. Net eksport antar daerah yang terdiri dari eksport antar daerah dan import antar daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan Ekspor-impor tahunan adalah sebagai berikut:

- a. Data Statistik Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)

- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (*fob*) dalam US\$. Penghitungan eksport barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai eksport-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai eksport-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun nonresiden. Sedangkan net eksport antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELOUARAN TAHUN 2020-2024



BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELOUARAN TAHUN 2020–2024

Perekonomian Jawa Barat selama 2020–2024 menunjukkan dinamika yang signifikan, terutama pasca-pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, ekonomi Jawa Barat mengalami kontraksi akibat dampak pandemi, dengan sektor-sektor utama seperti perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi terdampak cukup dalam. Namun, sejak tahun 2021, perekonomian mulai pulih seiring dengan pelaksanaan vaksinasi massal dan kebijakan pemulihan ekonomi. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai perkembangan indikator perekonomian makro, salah satunya adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Jawa Barat mengalami peningkatan substansial, mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin kuat di berbagai sektor. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan konsumsi masyarakat dan investasi, baik dalam infrastruktur maupun industri. Selain itu, perbaikan ekonomi juga tercermin dari peningkatan ekspor barang dan jasa dari Jawa Barat.

Selain menjadi salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, peningkatan perekonomian di Jawa Barat juga menunjukkan angka yang lebih masif dibanding wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa. Pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2024 secara c-to-c sebesar 4,95 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan provinsi di Pulau Jawa dan menjadi yang tertinggi kedua setelah Provinsi DIY. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh kenaikan yang terjadi pada hampir semua komponen, yang akan menjadi bahasan utama bab ini.

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELOUARAN

Pemulihan ekonomi Jawa Barat pasca covid-19 semakin terlihat nyata. Hal ini tercermin dari nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 yang terus meningkat pada periode tahun 2021-2024 pasca kontraksi yang terjadi di tahun 2020. Selain dari agregat, tren peningkatan juga terjadi untuk semua komponen penyusun PDRB menurut pengeluaran.

Sebagaimana diketahui bersama, PDRB menurut pengeluaran merupakan agregat dari beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT), Konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan net ekspor. Komponen utama penopang PDRB Jawa Barat adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT). Konsumsi akhir oleh rumah tangga atau Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) seringkali menjadi tolok ukur kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu wilayah. PKRT juga menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan tarikan permintaan dalam perekonomian. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) memberikan gambaran peran pemerintah dalam perekonomian, sesuai fungsinya sebagai penyedia pelayanan kolektif maupun pelayanan individu. Seluruh belanja yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan nilai PKP. Investasi yang dijabarkan oleh besaran PMTB dan perubahan inventori menggambarkan bagaimana pertambahan kekuatan perekonomian Jawa Barat, berupa kekayaan aset tetap. Daya saing produk domestik juga diperlihatkan oleh

besarnya peranan nilai ekspor. Nilai impor merupakan pengurang dalam perekonomian karena bukan merupakan produk dalam wilayah.

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Peningkatan nilai nominal PDRB ADHB dapat dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan perubahan volume. Tabel 1 menyajikan perkembangan PDRB ADHB menurut komponen dari tahun 2020 hingga 2024. Setelah sempat turun pada tahun 2020, PDRB atas dasar harga berlaku di Jawa Barat terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2024, nilai PDRB ADHB secara total menyentuh angka 2.823.338,73 miliar rupiah. Peningkatan ini mengindikasikan perekonomian secara makro tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, serta penguatan daya saing produk barang dan jasa wilayah di pasar nasional dan internasional.

Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020–2024 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1.378.904,38	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.869.119,19
2. Konsumsi LNPRT	13.340,95	13.760,94	14.720,00	17.446,05	19.144,01
3. Konsumsi Pemerintah	116.666,16	122.043,06	123.350,23	133.626,98	138.068,37
4. PMTB	489.180,23	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70
5. Perubahan Inventori	27.303,94	-15.151,20	2.492,32	2.061,05	1.423,05
6. Ekspor	914.423,48	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.144,90	1.711.448,42
7. Dikurangi Impor	857.711,88	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.149,70	1.613.234,00
Total PDRB	2.082.107,26	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.225,72	2.823.338,73

Keterangan : *angka sementara

**angka sangat sementara

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku memang terus meningkat sejak tahun 2021, namun perlu diketahui bahwa nominal ADHB ini masih mengandung dampak inflasi. Sebagai contoh, situasi geopolitik dunia mempengaruhi harga bahan bakar global, yang berdampak pada peningkatan harga kargo dan transportasi internasional. Hal ini tentu menimbulkan dampak yang signifikan pada perekonomian Jawa Barat, yang memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap situasi perdagangan global. Ekonomi Jawa Barat masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, di mana hampir 80 persen impornya berasal dari luar negeri sebagai bahan baku dan barang modal. Selain itu, dampak situasi perdagangan global terhadap ekonomi Jawa Barat juga karena provinsi ini yang menjadi lokasi strategis Penanaman Modal Asing (PMA) dan industri yang berorientasi ekspor.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010. Harga konstan ini berlaku untuk berbagai produk dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). Oleh karena itu, PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan dapat menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2020–2024, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Barat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2. Sejalan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 setelah sempat turun pada

tahun 2020 akibat pandemi. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik dan juga penurunan permintaan eksternal. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga konstan mencapai 1.752.071,20 miliar rupiah. Angka ini meningkat 82.649,71 miliar rupiah dibanding tahun 2023. Peningkatan PDRB ADHK ini disebabkan oleh kenaikan yang terjadi pada sebagian besar komponennya.

Tabel 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020–2024 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	894.114,73	905.974,62	948.326,48	998.976,60	1.048.976,70
2. Konsumsi LNPRT	8.971,94	9.144,60	9.430,85	10.752,89	11.601,21
3. Konsumsi Pemerintah	71.414,93	73.136,39	71.969,80	76.081,30	77.136,19
4. PMTB	336.213,72	357.977,88	359.006,10	386.751,79	413.661,87
5. Perubahan Inventori	16.198,45	-8.456,84	1.390,51	1.117,33	750,32
6. Ekspor	558.716,78	681.316,21	756.452,62	850.488,05	953.340,82
7. Dikurangi Impor	432.249,84	511.346,46	556.591,43	654.746,47	753.395,91
Total PDRB	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93	1.669.421,49	1.752.071,20

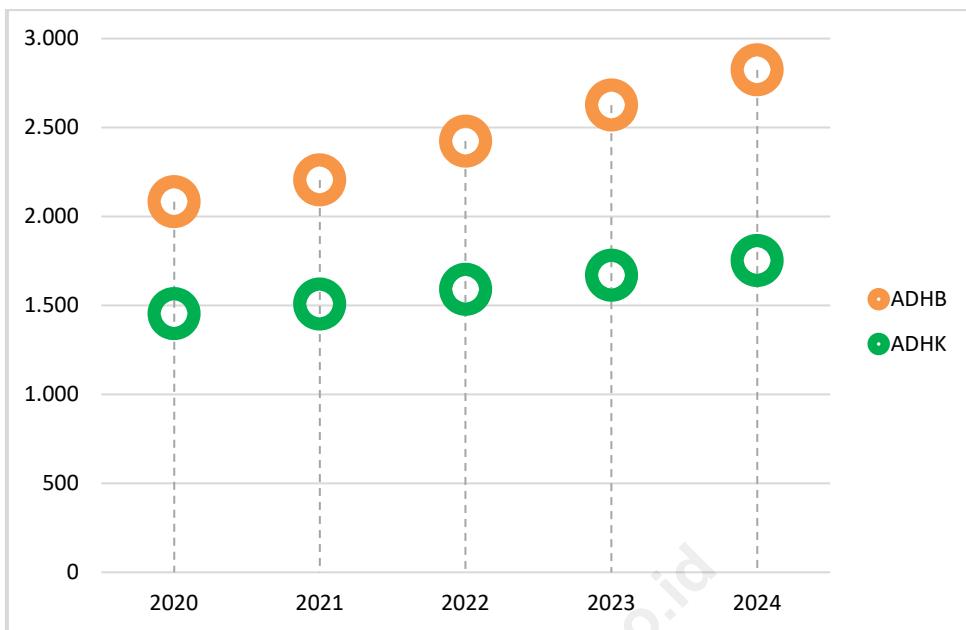
Keterangan : *angka sementara

**angka sangat sementara

Kenaikan nilai konstan terjadi pada hampir semua komponen PDRB pengeluaran. Komponen yang mengalami peningkatan yakni: PKRT, konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, PMTB, dan eksport-impor. Pada tahun 2024, konsumsi rumah tangga mencapai 1.048.976,70 miliar rupiah dan menjadi penopang utama PDRB dari sisi pengeluaran.

Konsumsi LNPRT dan konsumsi pemerintah masing-masing menyentuh 11.601,21 miliar rupiah dan 77.136,19 miliar rupiah. PMTB di Jawa Barat tahun 2024 mencapai 413.661,87 miliar rupiah dan mengalami peningkatan sejak tahun 2021. Selain itu, ekspor di Jawa Barat juga meningkat hingga mencapai 953.340,82 miliar rupiah. Kenaikan dari sisi ekspor ini juga diikuti oleh kenaikan impor pada tahun yang sama, meski secara nilai masih lebih rendah dibanding ekspor. Hal ini berimplikasi pada net ekspor yang bernilai positif. Dari sisi inventori, penyediaan stok di Jawa Barat masih bernilai positif (750,32 miliar rupiah), sedikit lebih rendah dibanding tahun 2023.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dibanding PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan nilai tersebut disajikan dalam Gambar 1. Perbedaan terjadi karena adanya pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Perubahan harga antarwaktu tersebut ditiadakan dalam penghitungan PDRB atas dasar harga konstan karena mengacu pada harga pada tahun 2010. Oleh karena itu, selisih nilai antara atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan merupakan nilai dari perubahan harga. Terlihat dari grafik bahwa peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku antartahun lebih curam dibanding yang terjadi pada PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan harga lebih besar dibanding perubahan volume.



Gambar 1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020–2024 (triliun rupiah)

Selain dari sisi nilai, analisis angka PDRB juga dilakukan dari segi peranan setiap komponennya. Tabel 3 menyajikan persentase setiap komponen pada pembentukan PDRB pengeluaran atas dasar harga berlaku. Secara konsisten, pengeluaran konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Jawa Barat dari sisi pengeluaran, dengan persentase sebesar 66,20 persen. Sumbangan PKRT terhadap PDRB ini meningkat dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 65,81 persen. Komponen dengan peranan yang signifikan selanjutnya adalah PMTB yang menyumbang hampir seperempat dari PDRB Jawa Barat. Share PMTB ini juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2023. Kemudian, nilai net eksport yang positif menunjukkan surplus yang terjadi pada neraca perdagangan Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2020–2024 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	66,23	64,62	64,82	65,81	66,20
2. Konsumsi LNPRT	0,64	0,62	0,61	0,66	0,68
3. Konsumsi Pemerintah	5,60	5,54	5,09	5,09	4,89
4. PMTB	23,49	24,73	23,81	24,55	24,70
5. Perubahan Inventori	1,31	-0,69	0,10	0,08	0,05
6. Ekspor	43,92	50,94	52,65	55,54	60,62
7. Dikurangi Impor	41,19	45,76	47,09	51,73	57,14
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *angka sementara

**angka sangat sementara

Selain dari nilai agregat PDRB ADHB dan ADHK, analisis perekonomian secara makro juga dapat dinilai dari pertumbuhan riil PDRB. Pertumbuhan ini juga dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ini sering digunakan untuk menilai kinerja pembangunan di bidang ekonomi pada suatu wilayah. Pemulihan ekonomi pasca pandemi yang terjadi di tahun 2020 dapat dinilai dari PDRB ADHK yang selalu tumbuh positif.

Sejak tahun 2021, ekonomi Jawa Barat selalu mengalami peningkatan. Akselerasi pemulihan ekonomi semakin tinggi seiring dengan aktivitas masyarakat yang telah kembali normal. Meski tidak secepat tahun 2023, perekonomian di Jawa Barat pada tahun 2024 berhasil tumbuh 4,95 persen. Pertumbuhan ekonomi total yang terjadi dibentuk dari kenaikan yang terjadi hampir pada semua komponen penyusun PDRB pengeluaran. Pertumbuhan positif terlihat pada komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, konsumsi pemerintah, PMTB, dan eksport.

**Tabel 4 Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2020–2024 (persen)**

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	-2,89	1,33	4,67	5,34	5,01
2. Konsumsi LNPRT	-4,08	1,92	3,13	14,02	7,89
3. Konsumsi Pemerintah	-1,15	2,41	-1,60	5,71	1,39
4. PMTB	-8,33	6,47	0,29	7,73	6,96
5. Perubahan Inventori	-62,85	-152,21	116,44	-19,65	-32,85
6. Ekspor	-5,57	21,94	11,03	12,43	12,09
7. Impor	-15,81	18,30	8,85	17,64	15,07
Total PDRB	-2,52	3,74	5,45	5,00	4,95

Keterangan : *angka sementara

**angka sangat sementara

Pertama, komponen konsumsi rumah tangga (PKRT) mengalami sedikit perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pertumbuhan komponen PKRT yang terjadi pada tahun 2024 melebihi kondisi yang terjadi di tahun 2020. Akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga dari tahun 2020 ini mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi dan konsumsi masyarakat pasca covid. Selain itu, sebagai komponen dengan peranan terbesar pada perekonomian Jawa Barat, akselerasi PKRT menjadi tumpuan pertumbuhan secara agregat.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat juga disumbang oleh konsumsi LNPRT. Pola konsumsi LNPRT umumnya mengikuti pola konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan komponen PKRT yang mengalami sedikit perlambatan, komponen konsumsi LNPRT juga melambat menjadi 7,89 persen setelah sebelumnya mampu tumbuh sebesar 14,02 persen di tahun 2023. Peningkatan yang signifikan di tahun 2023 disebabkan

meningkatnya aktivitas partai politik menjelang kegiatan pemilihan umum yang diadakan pada tahun 2024.

Komponen lain yang mengalami peningkatan adalah konsumsi pemerintah (PKP), yaitu sebesar 1,39 persen. Peningkatan ini dipicu oleh Kenaikan gaji PNS/TNI/POLRI dan Pensiunan terhitung mulai Januari 2024. Setelah mengalami akselerasi yang cukup tinggi pada tahun 2023, PKP melambat sebesar 1,39 persen pada tahun 2024. Perlambatan ini disebabkan adanya penghematan anggaran belanja perjalanan dinas kementerian/lembaga. Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas anggaran perjalanan dinas minimal 50 persen dari sisa alokasi pagu perjalanan dinas sesuai yang ditetapkan oleh Eselon Satu setiap kementerian/lembaga/dinas/instansi pemerintah.

Pada tahun 2023, kinerja PMTB mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,73 persen. Adapun kinerja PMTB atas dasar harga konstan pada tahun 2024 masih mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen atau meningkat sebesar 26.910,09 miliar rupiah menjadi 413.661,87 miliar rupiah. Komponen PMTB dalam perekonomian Jawa Barat memiliki kontribusi kedua terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga. Rata-rata peranan komponen PMTB selama tahun 2020-2024 sebesar 24,26 persen terhadap total PDRB.

Selain itu, pertumbuhan dengan arah positif juga ditunjukkan oleh komponen ekspor. Pada tahun 2024, ekspor Jawa Barat mampu tumbuh sebesar 12,09 persen. Pertumbuhan ekspor ini didorong oleh kendaraan dan bagianya (HS 87) yang merupakan golongan barang yang memiliki peranan terbesar dari total ekspor di Jawa Barat (20,82 persen). Kenaikan ekspor juga dibarengi dengan peningkatan impor pada periode waktu yang sama. Pada tahun 2024, impor di Jawa Barat naik 15,07 persen.

Pertumbuhan impor ini didorong oleh mesin/perlengkapan elektrik dan bagianya yang merupakan komoditas andalan yang memiliki peranan terbesar dari impor total di Jawa Barat (13,38 persen).

Sementara itu, kenaikan juga ditunjukkan oleh indeks implisit. Indeks ini menunjukkan sejauh mana perubahan tingkat harga dalam perekonomian. Secara rinci menurut komponen, indeks implisit menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri).

Indeks implisit atau dikenal sebagai deflator PDRB yang menunjukkan pengaruh perubahan harga pada PDRB dihitung dalam dua tahapan. Pertama, dengan menetapkan tahun dasar, dan tahap kedua dengan membandingkan harga saat ini dengan harga di tahun dasar. Adapun indeks implisit PDRB tahun 2020–2024 yang dirinci menurut komponen pengeluaran tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020–2024 (persen)

Komponen Pengeluaran	2020	2021	2022*	2023*	2024**
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	154,22	157,24	165,60	172,95	178,19
2. Konsumsi LNPRT	148,70	150,48	156,08	162,25	165,02
3. Konsumsi Pemerintah	163,36	166,87	171,39	175,64	178,99
4. PMTB	145,50	152,33	160,69	166,61	168,58
5. Perubahan Inventori	168,56	179,16	179,24	184,46	189,66
6. Ekspor	163,66	164,83	168,64	171,45	179,52
7. Impor	198,43	197,30	204,97	207,43	214,13
Total PDRB	143,26	146,22	152,38	157,25	161,14

Keterangan : *angka sementara

**angka sangat sementara

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga merupakan komponen utama pendorong perekonomian Jawa Barat dengan porsi lebih dari 60 persen selama lebih dari satu dekade terakhir. Kontribusi komponen pengeluaran rumah tangga yang besar ini sekaligus memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perekonomian total. Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga akan memberikan andil positif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi total wilayah Jawa Barat.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga adalah pendapatan rumah tangga, kekayaan rumah tangga, jumlah barang konsumsi tahan lama dalam masyarakat, tingkat bunga, perkiraan tentang masa depan, dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Faktor-faktor demografi yang mempengaruhi tingkat konsumsi adalah jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Sedangkan faktor-faktor non ekonomi yang paling berpengaruh terhadap tingkat konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat seperti pola kebiasaan makan, perubahan etika dan tata nilai untuk meniru kelompok masyarakat lain (Rahardja dan Manurung, 2008 dalam Najmi, dkk, 2018).

**Tabel 6 Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, 2020–2024**

Uraian	2020	2021	2022*	2023*	2024**
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Total Konsumsi Rumah Tangga (miliar rupiah)					
a. ADHB	1.378.904,38	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.869.119,19
b. ADHK 2010	894.114,73	905.974,62	948.326,48	998.976,60	1.048.976,70
Proporsi terhadap PDRB (persen)					
ADHB	66,23	64,62	64,82	65,81	66,20
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	95.812,37	97.849,03	106.657,41	116.158,21	124.542,46
b. ADHK 2010	62.127,04	62.227,37	64.405,44	67.163,39	69.895,03
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (ribu rupiah)					
a. ADHB	28.633,98	29.229,15	31.850,75	34.651,13	37.126,07
b. ADHK 2010	18.566,96	18.588,36	19.233,19	20.035,50	20.835,69
Pertumbuhan (persen)					
a. Total Konsumsi RT	-2,89	1,33	4,67	5,34	5,01
b. per-RT	-12,26	0,16	3,50	4,28	4,07
c. per kapita	-0,55	0,12	3,47	4,17	3,99
Jumlah penduduk (000 orang)	48.156,23	48.738,81	49.306,78	49.860,33	50.345,19

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Penduduk per kapita Tahun 2020 berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim

Penduduk per kapita Tahun 2021–2024 berdasarkan Proyeksi Hasil SP2020

Penduduk per-rumah tangga (RT) Tahun 2020–2024 berdasarkan Proyeksi Hasil SP2020

Selama lima tahun terakhir (2020–2024), konsumsi rumah tangga memiliki tendensi yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan perbaikan pendapatan rumah tangga, sebagai dampak pemulihan ekonomi. Selama periode waktu 2020 konsumsi akhir rumah tangga mengalami tekanan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan). Tekanan terhadap pendapatan masyarakat terjadi karena pembatasan mobilisasi dan aktivitas ekonomi. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap daya beli, hal tersebut ditunjukkan

pada Tabel 6. Penurunan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengindikasikan konsumsi rumah tangga tidak hanya menurun secara kuantitas tapi juga kualitas. Pandemi Covid-19 juga mengubah pola konsumsi pangan masyarakat dengan prioritas pada konsumsi bahan pokok dibandingkan dengan makanan dan minuman jadi. Selain itu pembatasan mobilisasi juga tidak memungkinkan masyarakat berkumpul di satu tempat ramai.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga atas dasar harga berlaku terus meningkat dari tahun ke tahun selama periode setelah Pandemi Covid-19 (tahun 2021–2024). Gambaran konsumsi per rumah tangga atas dasar harga konstan 2010 mempunyai pola yang sama dengan atas dasar harga berlaku. Jika dicermati secara nilai, pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2023 (116.158,21 ribu rupiah) telah melebihi nilai di tahun 2020 (95.812,37 ribu rupiah) sebagai dampak pemulihan ekonomi. Pada tahun 2024 rata-rata konsumsi per rumah tangga meningkat hingga mencapai 124.542,46 ribu rupiah.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2020–2024 rata-rata di atas 60 persen. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2020 sebesar 66,23 persen, namun pada tahun 2021 perannya menurun menjadi 64,62 persen, kemudian pada tiga periode berikutnya 2020–2024 berturut-turut mengalami peningkatan kontribusi yaitu masing-masing sebesar 64,82 persen, 65,81 persen, dan 66,20 persen.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumah tangganya, baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Selama lima tahun terakhir (2020–2024), nilai konsumsi per rumah tangga atas dasar harga

berlaku berturut-turut mengalami peningkatan sebagai dampak dari terjadinya kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi.

Setelah terjadinya penurunan daya beli di tahun 2020 sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, peningkatan mulai terlihat di tahun 2021 meskipun belum mencapai saat kondisi normal, peningkatan daya beli semakin tinggi pada periode selanjutnya 2022–2024. Aktivitas masyarakat telah berangsur normal sehingga aktivitas ekonomi kembali berjalan seperti sediakala, meskipun di beberapa sektor belum sepenuhnya normal. Laju pertumbuhan rata-rata konsumsi per rumah tangga menurun sebesar -12,26 persen pada tahun 2020. Namun di tahun 2021 mulai mengalami peningkatan seiring pemulihan ekonomi dan perbaikan pada konsumsi, yaitu sebesar 0,16 persen. Pada tahun 2022 - 2024 pertumbuhan rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat hampir mendekati sebelum pandemi, yaitu sebesar 3,50 persen dan pada tahun 2022, 4,28 pada tahun 2023, dan 4,07 pada tahun 2024.

Sementara itu, rata-rata konsumsi per kapita menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk. Rata-rata konsumsi per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 secara nominal sebesar 28.633,98 ribu rupiah, terus meningkat secara berturut-turut hingga mencapai 37.126,07 ribu rupiah pada tahun 2024. Hal ini sekaligus menunjukkan terjadi kenaikan harga barang dan jasa setiap tahunnya. Rata-rata konsumsi per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2020 sebesar 18.566,96 ribu rupiah, kemudian pada tahun 2022 meningkat melampaui nilai sebelum pandemi yaitu sebesar 19.233,19 ribu rupiah hingga mencapai 20.835,69 ribu rupiah di tahun 2024.

Laju pertumbuhan konsumsi per kapita sejalan dengan laju pertumbuhan konsumsi per rumah tangga, yaitu pada kisaran diatas 3

persen selama periode sebelum pandemi. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan konsumsi per kapita akhirnya mulai menemui titik balik menuju pemulihan, yaitu sebesar 0,12 persen, kemudian terus mengalami akselerasi hingga mencapai 3,99 persen di tahun 2024.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,89 persen. Konsumsi rumah tangga tahun 2021 mulai mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,33 persen dan terus mengalami akselerasi berturut-turut pada periode 2022–2023 masing-masing meningkat sebesar 4,67 persen dan 5,34 persen, kemudian melambat menjadi 5,01 persen pada tahun 2024.

Tabel 7 Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2020–2024¹ (persen)

Kelompok Konsumsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
a. Makanan, Minuman, dan Rokok selain restoran	44,84	45,30	45,98	45,99	46,40
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,79	3,74	3,57	3,45	3,33
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,68	10,35	10,12	9,89	9,62
d. Kesehatan dan Pendidikan	5,91	5,99	5,76	5,61	5,50
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	23,54	23,47	23,62	24,19	24,10
f. Hotel dan Restoran	5,87	5,83	5,77	5,77	5,84
g. Lainnya	5,37	5,32	5,17	5,10	5,21
Total Konsumsi	100	100	100	100	100

Keterangan : *angka sementara

**angka sangat sementara

Tabel 7 menggambarkan struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga. Terlihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2020 sampai dengan 2024, struktur konsumsi akhir rumah tangga Jawa Barat didominasi

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

oleh konsumsi bukan makanan dibandingkan konsumsi makanan. Setiap tahunnya, proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung berada pada kisaran yang sama. Namun demikian peranannya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari 44,84 persen (2020); 45,30 persen (2021); 45,98 (2022); 45,99 (2023); hingga pada tahun 2024 mencapai 46,40 persen. Sebaliknya, proporsi non makanan terus mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 55,16 persen; pada tahun 2021 sebesar 54,7 persen; pada tahun 2022 sebesar 54,02 persen, pada tahun 2023 sebesar 54,01 persen, dan pada tahun 2024 sebesar 53,60. Konsumsi makanan, minuman dan rokok tidak termasuk konsumsi makanan jadi dalam bentuk sajian, misalnya makanan jadi di restoran, warung makan dan sejenisnya. Makanan jadi dalam bentuk sajian masuk ke dalam kelompok konsumsi hotel dan restoran.

Tabel 8 Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2020–2024 (persen)

Kelompok Konsumsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	0,74	2,14	4,43	4,63	3,97
b. Pakaian dan Alas Kaki	-7,92	0,55	3,44	3,96	3,16
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-0,85	-0,79	4,11	4,90	4,66
d. Kesehatan dan Pendidikan	1,94	4,62	3,17	4,14	3,49
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	-8,44	0,80	6,37	7,05	6,83
f. Hotel dan Restoran	-4,83	0,71	5,01	6,10	6,94
g. Lainnya	-2,34	0,01	1,84	4,55	4,87

Keterangan : *angka sementara

**angka sangat sementara

Apabila dicermati pertumbuhan "riil" nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan secara berturut-turut menunjukkan tendensi yang meningkat terutama setelah periode pandemi. Saat pandemi tahun 2020 masih menunjukkan pertumbuhan positif meski melambat sebesar 0,74 persen. Kecenderungan rumah tangga untuk memprioritaskan konsumsi bahan pangan pokok menjadi salah satu penyebab pertumbuhan, selain itu berbagai bantuan pangan baik dari pemerintah maupun solidaritas masyarakat turut berpengaruh terhadap pertumbuhan sub komponen ini. Pada periode tahun 2021-2024 seiring dengan pemulihan ekonomi sehingga mendorong konsumsi masyarakat, pertumbuhan konsumsi makanan, minuman dan rokok cenderung meningkat yaitu sebesar 4,43 persen (2022) dan meningkat 4,63 persen (2023), namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 3,97 persen.

Pertumbuhan konsumsi pakaian dan alas kaki selama periode 2020-2024 mendapat tekanan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 menurun tajam dari tahun sebelumnya sehingga mengalami kontraksi sebesar 7,92 persen. Pembatasan aktivitas sosial ekonomi menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak memprioritaskan pengeluaran sandang sehingga berdampak terhadap penurunan sub komponen ini saat pandemi. Memasuki tahun 2021 kembali berangsur tumbuh sebesar 0,55 persen, disusul pada tahun 2022 dan 2023 meningkat masing-masing sebesar 3,44 persen dan 3,96 persen, namun pada tahun 2024 mengalami sedikit perlambatan sebesar 3,16 persen.

Pola yang sama terjadi pada pengeluaran transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya disebabkan adanya pembatasan mobilisasi masyarakat untuk beraktivitas saat pandemi tahun 2020. Adanya kebijakan ini menyebabkan penurunan pertumbuhan pada tahun 2020 dengan kontraksi

sebesar 8,44 persen. Namun, seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksin, kelompok pengeluaran ini mengalami pertumbuhan 0,8 persen pada 2021, dan meningkat signifikan sebesar 6,37 persen pada 2022 saat tidak ada lagi pembatasan aktivitas masyarakat. Dibukanya kembali perjalanan Umroh dan Haji serta kembali maraknya spot wisata dalam dan luar negeri pada tahun 2022 juga menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi pada kelompok komoditi ini, hal ini terus berlangsung hingga pada tahun 2023 mampu mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 7,05 persen, namun mengalami sedikit perlambatan di tahun 2024 (6,83 persen).

Sejalan dengan pola konsumsi sub kelompok transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya maka pengeluaran rumah tangga untuk hotel dan restoran mengalami penurunan tajam saat terjadi pandemi tahun 2020 sebesar 4,83 persen. Seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan kondisi pandemi yang semakin membaik pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan sebesar 0,71 persen. Sejak dibukanya kembali obyek wisata dan penerbangan internasional, sehingga aktivitas perjalanan pariwisata, umroh dan haji serta bisnis bangkit kembali dan telah menuju normal. Pariwisata sangat terkait dengan konsumsi pada kelompok komoditi hotel dan restoran. Hal ini mendukung peningkatan signifikan sub kelompok hotel dan restoran pada dua periode berturut-turut 2023-2024 masing-masing sebesar 6,10 persen dan 6,94 persen.

Sebagaimana pola pertumbuhan kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok kesehatan dan pendidikan terus mengalami pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 4,62 persen seiring dengan mulai dilakukan kembali

pembelajaran tatap muka namun pada tahun 2022 pertumbuhan melambat sebesar 3,17 persen. Pada tahun 2023 kembali terjadi peningkatan sebesar 4,14 persen. Hal ini menunjukkan dana yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi kesehatan dan pendidikan meningkat. Pada tahun 2024, kelompok kesehatan dan pendidikan melambat 3,49 persen.

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Perubahan tersebut mencakup perubahan harga pada seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 2,13 persen (2020); 2,19 persen (2021); 7,15 persen (2022); 5,17 persen (2023); dan 4,97 persen (2024). Pada tahun 2022 terjadi inflasi yang cukup tinggi pada kelompok komoditi ini yaitu mencapai 7,15 persen. Kenaikan harga beras, daging ayam, telur, bawang, cabe serta kenaikan cukai rokok menjadi pendorong tingginya inflasi pada tahun 2022. Kenaikan harga cukup tinggi masih berlangsung hingga tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 5,17 persen hal ini didorong oleh inflasi pada komoditas rokok kretek filter akibat kenaikan cukai rokok pada Januari 2023, dilanjutkan oleh kenaikan harga beras dan cabai merah. Pada tahun 2024, pertumbuhannya mulai melambat, yaitu sebesar 4,97 persen.

Sementara itu, harga pakaian dan alas kaki cenderung stabil dan terkendali yaitu sebesar 3,54 persen (2020); 1,22 persen (2021); 1,75 persen (2022); 2,24 persen (2023) dan pada tahun 2024 sebesar 1,44 persen. Harga produk pakaian dan alas kaki cenderung stabil, karena ketersediaan suplai tidak bersifat musiman, juga karena sifat komoditinya yang tahan lama. Hal yang lebih mempengaruhi harga komoditi ini adalah adanya peningkatan harga produksi karena kenaikan bahan baku atau bahan bakar.

Harga kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah cukup terkendali, pada periode tahun 2020-2021 pada kisaran 1 – 2 persen. Tercatat pada tahun 2021 inflasi kelompok tersebut berada di bawah 1 persen yang hanya sebesar 0,98 persen. Memasuki tahun 2022 terjadi kenaikan harga pada kelompok ini sehingga mendorong inflasi sebesar 3,53 persen. Inflasi berlanjut hingga tahun 2023 dengan inflasi sebesar 2,48 persen, namun pada tahun 2024 kelompok ini mengalami inflasi yang sangat rendah, yaitu 0,46 persen.

Tabel 9 Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2020–2024² (persen)

Kelompok Konsumsi	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	2,13	2,19	7,15	5,17	4,97
Pakaian dan Alas Kaki	3,54	1,22	1,75	2,24	1,44
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,44	0,98	3,53	2,48	0,46
Kesehatan dan Pendidikan	2,96	0,14	2,76	2,91	2,41
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	0,61	2,21	4,31	5,23	0,89
Hotel dan Restoran	2,33	1,85	3,99	3,61	2,50
Lainnya	4,65	2,25	5,26	3,73	5,50

Keterangan : *angka sementara

**angka sangat sementara

² Tingkat perubahan harga produk konsumsi

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Institusi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan lembaga non pemerintah yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakat. Dalam pembahasan global dikenal dengan istilah *civil society*. LNPRT berperan sebagai mitra pemerintah menyediakan jasa sosial kemasyarakatan, sehingga aktivitas ekonominya perlu dihitung. Selain itu, menurut SNA 2008 LNPRT sebagai salah satu pelaku ekonomi sehingga perlu disusun kerangka kerja sektor institusi LNPRT.

Peranan konsumsi akhir LNPRT di dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat minor apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa peranan institusi LNPRT dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT
Provinsi Jawa Barat, 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
Konsumsi Akhir LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	13.340,95	13.760,94	14.720,00	17.446,05	19.144,01
a. ADHK 2010 (Miliar Rp)	8.971,94	9.144,60	9.430,85	10.752,89	11.601,21
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,64	0,62	0,61	0,66	0,68

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Peranan konsumsi akhir LNPRT terhitung minor terhadap nilai perekonomian Jawa Barat. Dalam lima tahun terakhir, peranan konsumsi akhir LNPRT berada di bawah satu persen setiap tahunnya.

Proporsi tertinggi tercatat pada tahun 2024 sebesar 0,68 persen, sementara terendah pada tahun 2022 sebesar 0,61 persen.

Jika dilihat besaran nilainya, dalam lima tahun terakhir konsumsi akhir LNPRT cenderung mengalami peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Berikut catatan peristiwa terkait LNPRT selama 5 (lima) tahun terakhir.

Pada tahun 2020, terjadi pandemi Covid-19 yang mendorong adanya pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara menyeluruh. Hal ini memberi pengaruh pada aktivitas LNPRT, dimana kegiatan beribadah seluruhnya dilakukan dari rumah. Perayaan hari raya dan hari besar keagamaan di tempat-tempat ibadah dibatasi, bahkan ditiadakan, misalnya pada penyelenggaraan ibadah Shalat Tarawih di Bulan Ramadhan, Shalat Idul Fitri 1442 H, dan kegiatan kebaktian di gereja. Hal ini mengakibatkan kegiatan LNPRT yang bergerak di bidang keagamaan menurun.

Demikian pula dengan aktivitas LNPRT di bidang politik pada tahun ini. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang semula direncanakan digelar pada 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020. Persiapan Pilkada dan kampanye pun lebih banyak dilakukan secara daring atau secara tatap muka dengan pertemuan terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kondisi tersebut menyebabkan nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2020 mengalami penurunan. Konsumsi akhir LNPRT di Jawa Barat sepanjang 2020 terhitung sebesar 13.340,95 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 288,93 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2021, pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi Jawa Barat. Sepanjang tahun 2021, nilai konsumsi akhir LNPRT Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 419,99 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau menjadi sebesar 13.760,94 miliar rupiah. Nilai tersebut telah melampaui nilai konsumsi akhir LNPRT sebelum terjadinya Pandemi Covid-19.

Di tahun 2022, banyaknya kejadian bencana meningkatkan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT melalui peningkatan biaya layanan yang dikeluarkan oleh LNPRT. Dalam kejadian bencana, LNPRT berperan dalam pertolongan pertama maupun pada penanggulangan korban/lingkungan. Peran institusi LNPRT yang cukup berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian saat terjadinya bencana alam antara lain adalah lembaga bantuan kemanusiaan dan LSM. Selama tahun 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat telah terjadi 3.531 bencana di Jawa Barat. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada November 2022, aktivitas LNPRT meningkat signifikan dalam penanganan korban gempa Cianjur. Selain itu, melonggarnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara umum mendorong normalnya kegiatan LNPRT, termasuk kegiatan keagamaan sehingga menjadi pendorong meningkatnya nilai konsumsi akhir LNPRT Jawa Barat di tahun 2022 hingga mencapai 14.720,00 miliar rupiah.

Pendorong nilai konsumsi akhir LNPRT lainnya adalah adanya aktivitas politik, di mana pengeluaran konsumsi partai politik, sebagai salah satu pelaku LNPRT, cenderung mengalami peningkatan terutama pada periode menjelang atau ketika pemilu berlangsung. Hal ini terlihat pada periode tahun 2023-2024.

Tahun 2023 merupakan tahun persiapan pemilu tahun 2024. Kegiatan persiapan berupa musyawarah daerah (Musda), pemilihan pasangan calon anggota koalisi, rapat kesepakatan antar partai pendukung dan pertemuan politik banyak dilakukan. Kampanye dan sosialisasi partai politik, calon anggota legislatif, calon presiden/wakil presiden gencar dilakukan termasuk di Provinsi Jawa Barat yang merupakan salah satu lumbung suara Nasional dengan potensi pemilih sebanyak 35,71 Juta DPT. Hal ini memberikan suatu dorongan tambahan terhadap perekonomian di Jawa Barat, yang berdampak pada peningkatan signifikan nilai konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2023 yang mencapai 17.446,05 miliar rupiah atau meningkat 2.726,05 miliar dibanding tahun sebelumnya. Peran konsumsi akhir LNPRT pun meningkat menjadi 0,66 persen terhadap PDRB Jawa Barat.

Kemudian pada tahun 2024 yang merupakan tahun politik, nilai konsumsi akhir LNPRT mengalami peningkatan kembali mencapai 19.144,01 miliar rupiah. Peranan konsumsi akhir LNPRT pun kembali meningkat menjadi 0,68 persen terhadap nilai PDRB. Nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2024 salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan pemilu yang terdiri dari Pemilihan Presiden Indonesia (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) di tingkat pusat/daerah yang digelar pada 14 Februari 2024, dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tanggal 27 November 2024. Meskipun tahun 2024 merupakan tahun berlangsungnya pemilu, durasi kegiatannya tidak sepanjang durasi persiapan untuk Pilpres/Pileg di tahun 2023. Begitu pula dengan semarak Pilkada yang cenderung mengalami penurunan dibandingkan Pilpres/Pileg. Hal ini menyebabkan peningkatan konsumsi akhir LNPRT di tahun 2024 tidak setinggi peningkatan yang terjadi pada tahun 2023.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yakni mengusung tema Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif yakni pertumbuhan ekonomi yang merata serta bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat serta berkelanjutan dengan memperhatikan berbagai aspek yang telah ditetapkan.

Beberapa program prioritas pembangunan nasional yang diusung oleh pemerintah antara lain penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan; pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan; sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Pemerintah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dalam perekonomian wilayah, baik sebagai pencipta nilai tambah maupun sebagai yang melakukan konsumsi. Peranan pemerintah dalam melakukan konsumsi diantaranya adalah untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa dalam menjalankan kepemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk pegawai, belanja bantuan sosial, serta penyusutan barang modal. Konsumsi pemerintah sama dengan nilai output untuk komoditas nonpasar. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Selain nilai output pemerintah nonpasar, ada juga output pemerintah dengan harga pasar. Output pasar tersebut diantaranya adalah retribusi dan penerimaan lain-lain yang sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

yang berupa penerimaan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah untuk ADH Berlaku menunjukan peningkatan pada periode 2020–2024. Tahun 2020 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADH berlaku sebesar 116.666,16 miliar rupiah. Pada tahun 2024, nilai pengeluaran tersebut mencapai 138.068,37 miliar rupiah. Dari segi ADH Konstan 2010, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah tahun 2021 mengalami peningkatan dimana secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas. Tahun 2022 belanja pemerintah mengalami penurunan menjadi 71.969,80 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan penurunan APBN untuk belanja pegawai dan belanja modal. Memasuki tahun 2023 belanja pemerintah kembali mengalami peningkatan dengan nilai 76.081,30 miliar rupiah sejalan dengan peningkatan komponen belanja barang pemerintah, selain itu kegiatan persiapan Pemilu turut memicu kenaikan belanja pemerintah yang ditujukan untuk bantuan keuangan Partai Politik baik dari APBN maupun APBD. Sementara tahun 2024 belanja pemerintah mencatatkan peningkatan dengan nilai 77.136,19 miliar rupiah. Hal tersebut sejalan dengan peningkatan komponen belanja pegawai pemerintah, selain itu program penanganan stunting yang ditujukan untuk ibu hamil, calon pengantin, ibu bersalin serta balita serta keluarga yang berisiko terkena stunting dan meliputi juga pendamping kelompok sasaran, serta penyelesaian proyek infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah.

Jika dicermati lebih lanjut, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami penurunan secara berturut-turut selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2020 perannya sebesar 5,60 persen, hal ini terkait belanja yang ditujukan untuk penanganan Pandemi Covid-19 seperti anggaran kesehatan, bantuan dan perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi. Pengeluaran pemerintah kemudian berangsur menurun pada tahun 2021-2024 secara masing-masing sebesar 5,54 persen, 5,09 persen, 5,09 persen dan 4,89 persen.

Pengeluaran konsumsi pemerintah dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan pelayanan pemerintah di provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dapat diamati dari peningkatan konsumsi pemerintah per kapita ADH berlaku di mana selama periode 2020-2021 terjadi peningkatan pada rata-rata konsumsi per kapita. Konsumsi pemerintah per kapita ADH Berlaku pada tahun 2020 sebesar 2.422,66 ribu rupiah, kemudian tahun 2021 meningkat mencapai 2.504,02 ribu rupiah. Lalu pada tahun 2022, rata-rata konsumsi per kapita sedikit menurun menjadi 2.501,69 ribu rupiah (lihat Tabel 11). Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2023-2024 menjadi sebesar 2.680,03 ribu rupiah untuk tahun 2023, sedangkan tahun 2024 konsumsi pemerintah per kapita menjadi 2.742,43 ribu rupiah.

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADH Konstan (2010) menunjukkan adanya peningkatan selama periode tahun 2020-2021 (lihat Tabel 11). Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2020 konsumsi pemerintah per kapita 0,63 persen kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 1,19 persen. Namun konsumsi pemerintah per kapita terkontraksi pada tahun 2022 sebesar 2,73 persen. Memasuki tahun

2023- 2024 konsumsi pemerintah per kapita kembali meningkat yakni 4,54 persen untuk tahun 2023, sementara pada tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 0,41 persen.

Tabel 11 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022*	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar rupiah)	116.666,16	122.043,06	123.350,23	133.626,98	138.068,37
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	71.414,93	73.136,39	71.969,80	76.081,30	77.136,19
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	5,60	5,54	5,09	5,09	4,89
Konsumsi Pemerintah per kapita (ribu rupiah)					
a. ADHB	2.422,66	2.504,02	2.501,69	2.680,03	2.742,43
b. ADHK 2010	1.482,98	1.500,58	1.459,63	1.525,89	1.532,15
Konsumsi Pemerintah per pegawai (ribu rupiah)					
a. ADHB	303.140,00	337.317,22	313.082,77	317.142,37	307.022,59
b. ADHK 2010	185.561,29	202.143,11	182.670,96	180.566,85	171.527,73
Pertumbuhan (persen)³					
a. Total Konsumsi Pemerintah	-1,15	2,41	-1,60	5,71	1,39
b. Konsumsi Pemerintah per kapita	0,63	1,19	-2,73	4,54	0,41
c. Konsumsi Pemerintah per pegawai	1,12	8,94	-9,63	-1,15	-5,01
Jumlah penduduk (000 orang)	48.156,23	48.738,81	49.306,78	49.860,33	50.345,19
Jumlah pegawai (000 orang) ⁴	384,86	361,81	393,99	421,35	449,70

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Penduduk per kapita Tahun 2020 berdasarkan Proyeksi Penduduk Interim

Penduduk per kapita Tahun 2021 – 2024 berdasarkan Proyeksi Hasil SP2020

Pegawai terdiri dari PNS Pusat, Daerah dan PPPK Pusat, Daerah

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁴ Tidak termasuk polisi dan militer

Dalam kurun waktu tahun 2020–2021 rata-rata konsumsi pemerintah per pegawai ADH Berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Pada tahun 2020 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 303.140,00 ribu rupiah, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 337.317,22 ribu rupiah (lihat Tabel 11). Namun pada tahun 2022, rata-rata konsumsi pemerintah per pegawai menurun menjadi 313.082,77 ribu rupiah, dan sedikit mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 317.142,37 ribu rupiah. Akan tetapi pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 307.022,59 ribu rupiah.

Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pemerataan menurut pegawai juga menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 meningkat sebesar 1,12 persen, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sangat signifikan yakni sebesar 8,94 persen. Namun pada tahun 2022, konsumsi pemerintah per pegawai mengalami kontraksi cukup dalam menjadi 9,63 persen. Memasuki tahun 2023 pengeluaran pemerintah per pegawai terkoreksi namun masih mengalami kontraksi sebesar 1,15 persen, kemudian pada tahun 2024 kembali mengalami kontraksi sebesar 5,01 persen.

Di sisi lain, selama periode tahun 2020-2021 jumlah pegawai pemerintah cenderung mengalami penurunan hal tersebut diakibatkan terjadinya kebijakan moratorium penerimaan pegawai oleh pemerintah. Jumlah pegawai pemerintah pada tahun 2020 sebanyak 384.859 orang kemudian pada tahun 2021 menjadi 361.805 orang. Kemudian pada tahun 2022 pemerintah kembali membuka rekrutmen dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) mengakibatkan pada tahun 2022 jumlah pegawai mengalami peningkatan menjadi 393.986 orang yang terdiri dari 344.118 orang PNS

dan PPPK 49.868 orang. Kemudian pada tahun 2023-2024 pemerintah kembali membuka penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) hal tersebut menyebabkan terciptanya peningkatan jumlah pegawai pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2023 jumlah pegawai pemerintah di Provinsi Jawa Barat sejumlah 421.347 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 327.676 dan PPPK mencapai 93.671 orang. Sementara untuk tahun 2024 terjadi peningkatan jumlah pegawai menjadi 449.701 orang yang terdiri dari 319.289 orang PNS dan jumlah PPPK sebanyak 130.412 orang.

Secara umum, gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" tersebut menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir, yang terdiri dari dua komponen, yakni pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Pengeluaran konsumsi kolektif adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa diakses seluruh masyarakat, contoh jasa pertahanan dan keamanan oleh TNI/Polri, pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Akta Tanah, perijinan dan layanan administrasi lainnya. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Individu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbatas jumlahnya dan hanya dapat dikonsumsi apabila memenuhi syarat tertentu (biasanya harga), singkatnya adalah konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk

melayani publik dengan target tertentu. Misalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas. Dalam konsumsi ini termasuk juga biaya untuk perlindungan sosial.

Secara struktur, bagian terbesar dari total konsumsi akhir pemerintah adalah untuk pengeluaran konsumsi kolektif, yaitu seluruh biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghasilkan barang dan jasa kolektif. Meskipun demikian, proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah cenderung menurun sejak tahun 2020 sebesar 59,60 persen hingga tahun 2021 menjadi 54,54 persen kemudian berangsur mengalami peningkatan pada tahun 2022–2024 masing-masing sebesar 55,24 persen pada tahun 2022 dan 55,89 persen dengan nilai pada tahun 2023 sejumlah 74.677,46 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2024 meningkat menjadi 56,95 persen dengan nilai 78.633,55 miliar rupiah.

Tabel 12 Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2020-2024

Uraian	2020 [1]	2021 [2]	2022 [3]	2023* [4]	2024** [5]
Struktur Konsumsi Akhir (Belanja) Pemerintah (ADHB)					
a. Konsumsi Kolektif <i>(miliar rupiah)</i>	69.534,19	66.564,86	66.901,98	74.677,46	78.633,55
(% konsumsi Kolektif)	59,60	54,54	55,24	55,89	56,95
b. Konsumsi Individu <i>(miliar rupiah)</i>	47.131,96	55.478,20	56.448,25	58.949,53	59.434,82
(% konsumsi individu)	40,40	45,46	45,76	44,11	43,05
Total Konsumsi <i>(miliar rupiah)</i>	116.666,16	122.043,06	123.350,23	133.626,98	138.068,37
(Proporsi)	100	100	100	100	100
Pertumbuhan Riil (ADHK 2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	-4,85	-6,75	-1,90	8,95	3,11
b. Konsumsi Individu	4,86	15,94	-1,23	1,90	-0,78
Total Konsumsi	-1,15	2,41	-1,60	5,71	1,39

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Pertumbuhan Indeks Harga Implisit (%)					
a. Konsumsi Kolektif	0,51	2,66	2,46	2,45	2,13
b. Konsumsi Individu	0,46	1,53	3,01	2,49	1,62
Total Konsumsi	0,49	2,15	2,71	2,48	1,91

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Trend konsumsi individu secara nominal mengalami peningkatan dari tahun 2020–2024, pada tahun 2021 meningkat senilai 8.346,23 miliar rupiah dari tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2022 meningkat dengan nilai nominal 56.448,25 miliar rupiah (Tabel 12) lalu pada tahun 2023 meningkat kembali dengan nilai nominal 58.949,53 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2024 meningkat senilai 485,29 miliar rupiah dengan nilai nominal 59.434,82 miliar rupiah. Hal ini sejalan dengan peranannya terhadap total konsumsi pemerintah yang mengalami peningkatan pada periode 2020-2022 dan kemudian menurun pada tahun 2023-2024 sebesar 44,11 persen untuk tahun 2023. Sementara itu pada tahun 2024 meski secara nilai nominal mengalami peningkatan namun peranannya terhadap konsumsi pemerintah secara total mengalami penurunan yakni pada posisi 43,05 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasi menjadi investasi (fisik). Dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada

berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Investasi merupakan komponen PDB/PDRB yang menghubungkan antara saat ini dan masa mendatang. Investasi memegang peranan penting tidak hanya dalam pertumbuhan siklus usaha jangka panjang tetapi juga dalam jangka pendek karena merupakan komponen yang paling tidak stabil dalam PDRB. Mankiw (2010) mengemukakan bahwa bagian terbesar dari pengeluaran investasi yaitu sejumlah tiga per empat dari total adalah investasi tetap bisnis. Adapun yang dimaksud bisnis adalah investasi barang yang dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi yang akan datang. Kata tetap artinya pengeluaran ini untuk kapital yang akan tinggal untuk sementara sebagai lawan dari investasi persediaan, yang akan digunakan atau dijual dalam waktu singkat. Investasi tetap bisnis mencakup semuanya, mulai dari perabot kantor hingga pabrik, komputer, dan mobil perusahaan.

Perkembangan investasi fisik di wilayah Jawa Barat selama tahun 2024 tercermin dari beberapa indikator ekonomi yaitu informasi belanja modal berupa pembangunan infrastruktur dan belanja modal nonbangunan yang dilakukan oleh seluruh institusi pelaku ekonomi, rumah tangga, lembaga nonprofit, pemerintah, dan korporasi. Informasi pendukung untuk mengetahui nilai investasi dapat diperoleh dari data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta fenomena pembangunan di kawasan industri Jawa Barat.

Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pembangunan investasi fisik tertuang dalam kebijakan pembangunan wilayah berupa pencapaian visi dan misi. Visi yang diusung adalah "Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi". Untuk mendukung

pencapaian visi ini maka dijabarkan ke dalam lima misi. Pembangunan infrastruktur memiliki relevansi dengan misi ketiga yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan serta tata ruang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu program kerja dan kegiatan yang relevan.

Berbagai program yang digulirkan pemerintah membawa hasil. Dilansir dari rilis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, selama periode 2020—2024 total realisasi investasi di Jawa Barat baik yang berasal dari Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri selalu mengungguli realisasi investasi PMA dan PMDN provinsi lainnya di Indonesia. BKPM mencatat realisasi investasi di Jawa Barat sepanjang tahun 2024 sebesar 251,14 triliun rupiah atau 14,6 persen dari seluruh realisasi investasi di Indonesia dan berhasil menyerap sekitar 383 ribu tenaga kerja. Hal ini didukung dengan menggeliatnya pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Barat, antara lain pembangunan Jalan Tol Akses Patimban sepanjang 22,94 kilometer di Kabupaten Subang, dan pembangunan *Fly Over* Nurtanio yang terletak di ruas jalan nasional Abdul Rahman Saleh Kota Bandung.

Perkembangan aktivitas investasi fisik di Jawa Barat pada tahun 2020 mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2019. Hal ini tercermin dari nilai PMTB ADH konstan yang mengalami penurunan menjadi 336.213,72 miliar rupiah. Penurunan ini terjadi akibat pembatasan aktivitas perekonomian sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*, sehingga aktivitas investasi fisik pun mengalami penurunan. Tercatat nilai PMTB ADH berlaku tahun 2020 juga menurun dibandingkan dengan nilai pada tahun 2019 menjadi 489.180,23 miliar rupiah.

Seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, aktivitas investasi fisik di Jawa Barat mengalami peningkatan mulai tahun 2021. Nilai PMTB ADH berlaku pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 545.297,64 miliar rupiah dan 576.895,25 miliar rupiah. Nilai PMTB tahun 2023 juga meningkat dibandingkan nilai tahun 2022 menjadi 644.379,45 miliar rupiah. Adapun nilai PMTB tahun 2024 meningkat sebesar 52.990,25 miliar rupiah menjadi sebesar 697.369,70 miliar rupiah.

Selain dinilai ADH berlaku, PMTB juga dinilai menurut ADH konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang divaluasi dengan harga pada tahun 2010. Pengeluaran untuk pembentukan kapital (PMTB) mempunyai tren yang sama antara ADH konstan dengan ADH berlakunya. Kinerja PMTB pada tahun 2020 turut terdampak pandemi Covid-19 sehingga nilai riil mengalami kontraksi hingga 8,33 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 336.213,72 miliar rupiah.

**Tabel 13 Perkembangan dan Struktur PMTB
Provinsi Jawa Barat, 2020 - 2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total PMTB					
a. ADHB (miliar rupiah)	489.180,23	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	336.213,72	357.977,88	359.006,10	386.751,79	413.661,87
Proporsi terhadap PDRB (%) - ADHB)	23,49	24,73	23,81	24,55	24,70
Struktur PMTB⁵					
a. Bangunan (miliar rupiah) (%)	392.849,74	436.960,10	452.921,79	498.215,80	537.204,57
b. Nonbangunan (miliar rupiah) (%)	96.330,49	108.337,54	123.973,46	146.163,66	160.165,13
Total PMTB (miliar rupiah) (%)	489.180,23	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70
Total PMTB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,0
Pertumbuhan⁶ (%)					
a. Bangunan	-5,96	5,84	-2,01	6,21	7,07
b. Nonbangunan	-17,33	9,22	9,91	13,42	6,57
Total PMTB	-8,33	6,47	0,29	7,73	6,96

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Pada tahun 2021 dan 2022, kinerja PMTB kembali menguat yang tercermin pada pertumbuhan positif masing-masing sebesar 6,47 persen dan 0,29 persen dengan nilai mencapai 357.977,88 miliar rupiah pada tahun 2021 dan 359.006,10 miliar rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kinerja PMTB mengalami akselerasi dibandingkan tahun 2022 sebesar 7,73 persen. Adapun kinerja PMTB tahun 2024 masih mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen atau meningkat sebesar 26.910,09 miliar rupiah menjadi 413.661,87 miliar rupiah. Peningkatan nilai PMTB ADH konstan 2010

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

⁶ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

menggambarkan pertumbuhan riil komponen PMTB di Jawa Barat karena nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga komponen PMTB.

Komponen PMTB dalam perekonomian Jawa Barat memiliki kontribusi kedua terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga. Rata-rata peranan komponen PMTB selama tahun 2020-2024 sebesar 24,26 persen terhadap total PDRB. Selama lima tahun terakhir, kontribusi PMTB terhadap perekonomian Jawa Barat mengalami capaian terbesar di tahun 2021 yaitu sebesar 24,73 persen dan terendah di tahun 2020 sebesar 23,49 persen.

Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kinerja PMTB tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga 8,33 persen. Memasuki tahun 2021 komponen PMTB kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,47 persen, namun kembali mengalami perlambatan sebesar 0,29 persen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, komponen PMTB mengalami akselerasi sebesar 7,73 persen. Pada tahun 2024 komponen PMTB juga masih mengalami pertumbuhan sebesar 6,96 persen (Tabel 13).

Komponen PMTB didisagregasi menjadi dua subkomponen dalam publikasi ini yaitu bangunan dan non bangunan. Pengeluaran untuk jenis aset fisik berupa bangunan mendominasi dalam perekonomian Jawa Barat. Hal ini terlihat dari proporsi PMTB bangunan sebesar lebih dari tiga per empat bagian total PMTB. Peranan komponen PMTB bangunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 80,31 persen dan berangsur-angsur mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 80,13 persen, tahun 2022 menjadi 78,51 persen, tahun 2023 menjadi 77,32 persen dan tahun 2024 menjadi 77,03 persen.

Sementara itu, komponen PMTB nonbangunan memiliki rincian sebagai berikut: Mesin dan Perlengkapan; Kendaraan; Peralatan lainnya;

Tanaman Menghasilkan Produk Berulang; Hewan Menghasilkan Berulang; Produk Kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang Tidak Diproduksi. Selama periode 2020-2024, Peranan PMTB nonbangunan terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar 22,97 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 19,69 persen. Peranan komponen PMTB nonbangunan memiliki kecenderungan yang meningkat mulai tahun 2021 sampai tahun 2024. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kontribusi PMTB bangunan.

Aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2020 menurun dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di Jawa Barat pada Triwulan II tahun 2020 sehingga berdampak pada kinerja PMTB Bangunan yang terkontraksi sebesar 5,96 persen. Pada tahun 2021 meskipun masih terdapat pembatasan aktivitas ekonomi kinerja PMTB bangunan mengalami peningkatan sebesar 5,84 persen. Namun mengalami kontraksi sebesar 2,01 persen pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi pengadaan semen sepanjang tahun 2022 yang mengalami penurunan 11,48 persen dibanding tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023 meningkat kembali sebesar 6,21 persen didukung oleh menggeliatnya pembangunan strategis di Jawa Barat, seperti proyek KCJB, proyek pembangunan tol, serta pembangunan Pelabuhan Patimban. Pada tahun 2024, PMTB bangunan juga masih tumbuh sebesar 7,07 persen.

Sementara itu, indikator yang dapat digunakan untuk mengamati perkembangan penambahan barang modal berupa mesin-mesin, kendaraan, peralatan dan perlengkapan dapat dicermati pada data Impor Barang Modal menurut penggolongan penggunaan barang atau *Broad Economics Category* (BEC). Komponen PMTB nonbangunan memiliki rincian

sebagai berikut: Mesin dan Perlengkapan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Tanaman Menghasilkan Produk Berulang; Hewan Menghasilkan Berulang; Produk Kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang Tidak Diproduksi. Secara umum kinerja subkomponen PMTB nonbangunan pada periode 2020—2024 memiliki tendensi yang meningkat, kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 17,33 persen sebagai dampak pandemi Covid-19. Belanja barang modal kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 dengan kinerja positif masing-masing sebesar 9,22 persen dan 9,91 persen, serta terus mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 13,42 persen dan pada tahun 2024 sebesar 6,57 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Deskripsi inventori pada unit institusi merupakan persediaan barang yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, belum selesai diproses, atau belum terjual. Sementara perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bermakna penambahan atau pengurangan. Secara makro, inventori merupakan bagian dari pembentukan modal atau investasi fisik. Informasi inventori menjelaskan mengenai porsi investasi yang telah terealisasi dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi dalam berbagai aktivitas produksi. Sebagian investasi ini direalisasikan untuk keperluan bahan baku maupun bahan penolong.

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang nilainya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Perubahan inventori yang bertanda positif bermakna bahwa terjadi penambahan persediaan barang,

sedangkan jika bertanda negatif bermakna bahwa terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Kontribusi Komponen Perubahan Inventori dalam perekonomian Jawa Barat dalam lima tahun terakhir cukup rendah, yakni selalu berada di bawah 4 persen setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2021 nilai perubahan inventori Jawa Barat bertanda negatif, yang berarti terjadi penurunan inventori di akhir tahun 2021 jika dibandingkan dengan awal tahun. Pada tahun 2024 kontribusi komponen perubahan inventori sebesar 0,05 persen. Perkembangan nilai komponen perubahan inventori dan proporsinya dalam perekonomian Jawa Barat selama periode 2020-2024 ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14 Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (miliar rupiah)	27.303,94	-15.151,20	2.492,32	2.061,05	1.423,05
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	16.198,45	-8.456,84	1.390,51	1.117,33	750,32
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB) ⁵	1,31	-0,69	0,10	0,08	0,05

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

Pada tahun 2020, dalam kondisi pandemi di mana kinerja perekonomian Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar 2,52 persen, peranan perubahan inventori di dalam PDRB Jawa Barat pun terkoreksi cukup signifikan, yakni menjadi sekitar 1,31 persen. Di tahun 2020, nilai komponen ADH berlaku perubahan inventori sebesar 27.303,94 miliar

rupiah atau terkontraksi dari tahun sebelumnya. Kebijakan *lockdown* di beberapa negara mitra dagang menyebabkan arus barang ekspor dan impor luar negeri menjadi terhambat. Begitu pula dengan adanya pembatasan mobilitas manusia pun menyebabkan proses produksi barang dan jasa mengalami penurunan. Proses produksi lebih banyak memanfaatkan bahan baku yang sudah ada karena terhambatnya arus masuk barang impor dari luar negeri.

Pelonggaran aktivitas ekonomi yang diterapkan di tahun 2021 berdampak positif pada perbaikan perekonomian Jawa Barat. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,52 di tahun 2020, produksi barang dan jasa Jawa Barat kembali meningkat di 2021, tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang bernilai positif sebesar 3,74 persen. Peningkatan utilitas produksi memanfaatkan bahan baku yang sudah ada, sedangkan barang jadi yang tertahan di produsen maupun pedagang karena adanya pembatasan di tahun 2020 sudah mulai terdistribusikan seiring dengan penerapan PPKM berlevel. Hal itu mengakibatkan inventori di akhir tahun 2021 menjadi lebih rendah dari pada kondisi di awal tahun. Kondisi tersebut berimplikasi pada nilai perubahan inventori Jawa Barat bertanda negatif yaitu senilai -15.151,20 miliar rupiah atau menurun sekitar 42.455,13 miliar rupiah jika dibandingkan nilai di tahun sebelumnya.

Selanjutnya di tahun 2022, perekonomian Jawa Barat kembali mendekati kondisi normal. Perubahan inventori kembali meningkat menjadi sebesar 2.492,32 miliar rupiah atau mengalami kenaikan 116,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Besaran perubahan inventori menunjukkan angka positif yang dapat diartikan bahwa terjadi penambahan dalam persediaan barang.

Di tahun 2023, perekonomian Jawa Barat berangsur kembali normal seiring peningkatan mobilitas masyarakat pasca pandemi Covid-19 seiring penetapan berakhirnya status Pandemi Covid-19 yang tertuang dalam Kepres No.17 Tahun 2023. Pada tahun 2023 nilai nominal perubahan inventori sebesar 2.061,05 miliar rupiah atau menurun 431,27 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, proporsi perubahan inventori di dalam perekonomian Jawa Barat sedikit mengalami penurunan menjadi 0,08 persen.

Secara keseluruhan Pada tahun 2024, perekonomian Jawa Barat menunjukkan kondisi yang normal setelah beberapa tahun sebelumnya dilanda pandemi Covid-19. Pada tahun 2024 nilai nominal perubahan inventori sebesar 1.423,05 miliar rupiah atau menurun 638,01 miliar rupiah dari tahun sebelumnya, namun untuk proporsi perubahan inventori dalam perekonomian Jawa Barat mengalami penurunan menjadi 0,05 persen.

Perubahan nilai nominal komponen perubahan inventori dipengaruhi oleh perubahan volume dan perubahan harga, sehingga untuk melihat kondisi perubahan inventori dalam nilai riilnya, dapat digunakan nilai atas dasar harga konstan. Dalam lima tahun terakhir nilai riil komponen perubahan inventori Jawa Barat memperlihatkan pola yang sama dengan nilai nominalnya. Kontraksi ekonomi yang terjadi di 2020 mempengaruhi jumlah inventori, di mana barang menjadi banyak yang tertahan di produsen maupun pedagang karena adanya pembatasan pergerakan. Kegiatan ekspor yang terhambat, menyebabkan arus barang lebih banyak beredar di wilayah domestik dan antar provinsi, namun hal itu tidak maksimal karena pembatasan mobilitas dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan nilai riil perubahan inventori

Jawa Barat menurun drastis menjadi sebesar 16.198,45 miliar rupiah pada tahun 2020.

Memasuki tahun 2021, produsen berusaha menggenjot utilitas seiring dengan adanya kebijakan pelonggaran kegiatan pada sektor-sektor tertentu. Proses produksi lebih banyak mengandalkan bahan baku yang sudah ada karena aktivitas impor belum kembali sepenuhnya normal. Distribusi barang berjalan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, menyebabkan stok barang yang tertahan dapat dikurangi. Hal itu berimplikasi pada nilai riil komponen perubahan inventori yang bertanda negatif, yakni sebesar -8.456,84 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022, secara riil komponen perubahan inventori mengalami peningkatan dan menunjukkan angka positif sebesar 1.390,51 miliar rupiah. Pada tahun 2023, secara riil komponen perubahan inventori mengalami penurunan namun tetap menunjukkan angka positif sebesar 1.117,33 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2024, secara riil komponen perubahan inventori mengalami penurunan namun angkanya tetap menunjukkan positif sebesar 750,32 miliar rupiah.

Perubahan inventori merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian inventori merupakan bagian dari investasi, sedangkan perubahan inventori terjadi karena adanya proses produksi maupun impor. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengamati aktivitas inventori antara lain dengan mengamati nilai impor bahan baku. Data KPPBC lingkup Jawa Barat menunjukkan kontribusi impor bahan baku yang dilakukan oleh Jawa Barat sangat signifikan yaitu sebesar 77,96 persen pada tahun 2024. Jenis impor bahan baku dominan adalah kelompok bahan baku untuk industri dengan kontribusi sekitar 47,96 persen dari keseluruhan nilai impor Jawa Barat di tahun 2023. Secara

kumulatif, nilai impor bahan baku/penolong Jawa Barat tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,95 persen dibandingkan tahun lalu. Pendekatan lain untuk mengamati perubahan inventori adalah melalui data persediaan dan produksi beras. Berdasarkan data hasil KSA (Kerangka Sampel Area) tahun 2024, produksi padi Jawa Barat menurun sebesar 5,61 persen dibandingkan produksi tahun 2023, yaitu dari sebanyak 9,14 juta ton di tahun 2023 menjadi 8,63 juta ton di tahun 2024 atau mengalami penurunan sebanyak 0,51 juta ton GKG.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Komoditas yang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor berasal dari output yang dihasilkan oleh aktivitas produksi suatu wilayah pada suatu periode tertentu setelah dikurangi dengan konsumsi dan investasi. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi oleh residen di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh nonresiden pihak di luar wilayah atau luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah Jawa Barat tidak seluruhnya dilakukan oleh residen, tetapi terdapat permintaan dari nonresiden. Permintaan barang dan jasa terhadap produk domestik dari nonresiden di mana diwujudkan dalam aktivitas perdagangan internasional berupa transaksi ekspor.

Perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan efek domino terhadap perekonomian, terutama berdampak pada aktivitas perdagangan internasional. Pemulihan ekonomi global mulai terlihat sejak tahun 2021

dan terus mengalami perbaikan hingga tahun 2023. Hal ini terlihat dari data transaksi perdagangan antar negara yang menunjukkan peningkatan. Permintaan global terhadap komoditas yang berasal dari Jawa Barat khususnya masih mengalami peningkatan meskipun melemah.

Jawa Barat merupakan wilayah dengan kontribusi ekspor luar negeri terbesar di tingkat nasional. Ekspor Indonesia terbesar menurut provinsi asal barang periode Januari – Desember 2024 adalah Jawa Barat dengan nilai US\$37,87 miliar (14,31 persen), diikuti oleh Jawa Timur sebesar US\$25,72 miliar (9,72 persen), dan Kalimantan Timur sebesar US\$25,46 miliar (9,62 persen). Data ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor Jawa Barat memiliki dampak signifikan di tingkat nasional, hal ini tidak terlepas dari peranan utama ekspor sebagai penghasil devisa negara. Selain itu ekspor berperan dalam perluasan pasar bagi produk domestik, peningkatan jumlah investasi dalam negeri, serta memperbaiki ekonomi negara karena dapat memperbesar cadangan devisa negara tersebut.

Gambaran aktivitas ekspor di Jawa Barat selama tahun 2021—2024 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan baik secara nominal maupun riil. Komponen ekspor merupakan faktor penambah bagi perekonomian wilayah, devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor dapat dioptimalkan untuk kegiatan pembangunan, selain itu dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif wilayah. Aktivitas ekspor tahun 2024 mengalami peningkatan kinerja. Secara nominal atas dasar harga berlaku komponen Ekspor Barang dan Jasa pada lima tahun terakhir (2020—2024) mengalami penambahan sebesar 797.024,95 miliar rupiah, nilai ekspor pada tahun 2020 masih pada posisi 914.423,48 miliar rupiah dan pada tahun 2024 telah mencapai 1.711.448,42 miliar rupiah. Sementara secara riil nilai pada tahun 2020 sebesar 558.716,78 miliar rupiah dan tahun

2024 telah mencapai 953.340,82 miliar rupiah atau terjadi penambahan selama kurun waktu tersebut sebesar 394.624,04 miliar rupiah.

Peranan komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap total perekonomian Jawa Barat selama 2020-2024 secara rata-rata sebesar 52,73 persen. Selama lima periode (2020-2024) kontribusi komponen ini cenderung mengalami peningkatan. Komponen Ekspor Barang dan Jasa ini meskipun memiliki kontribusi yang besar dan berperan sebagai faktor penambah dalam perekonomian perlu dibandingkan dengan kontribusi komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam perekonomian.

**Tabel 15 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Barat, 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (miliar rupiah)	914.423,48	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.144,90	1.711.448,42
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	558.716,78	681.316,21	756.452,62	850.488,05	953.340,82
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB) ⁷	43,92	50,94	52,65	55,54	60,62
Pertumbuhan					
Total ekspor ⁸	-5,57	21,94	11,03	12,43	12,09

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Pada tahun 2020, kinerja Ekspor Barang dan Jasa mengalami penurunan dan kembali meningkat mulai tahun 2021—2024. Pada tahun 2020 kinerja Ekspor Barang dan Jasa terkontraksi 5,57 persen seiring

⁷ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

merebaknya pandemi Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap permintaan ekspor global. Pemulihan ekonomi global memicu permintaan terhadap komoditas ekspor Jawa Barat sehingga terjadi pertumbuhan signifikan sebesar 21,94 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 kinerja Ekspor Barang dan Jasa mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 11,03 persen akibat perang panas Rusia dan Ukraina yang mengganggu arus perdagangan internasional. Pada tahun 2023 ekspor Jawa Barat mengalami akselerasi sebesar 12,43 persen, namun kembali melambat pada tahun 2024 sebesar 12,09 persen.

Berdasarkan kontribusi terhadap nilai ekspor barang luar negeri, urutan negara tujuan ekspor barang luar negeri Jawa Barat tahun 2024 adalah sebagai berikut: 1) Amerika Serikat US\$6,34 miliar (16,74 persen); 2) Filipina US\$3,30 (8,70 persen); 3) Jepang US\$2,82 (7,45 persen); 4) Vietnam US\$2,09 (5,51 persen); dan 5) Tiongkok US\$1,90 (5,03 persen). Kelima negara tujuan ekspor ini berkontribusi hampir separuh dari total ekspor barang luar negeri Jawa Barat atau sebesar 43,43 persen. Ekspor barang luar negeri Jawa Barat dengan tujuan kelima negara tersebut mengalami kenaikan, kecuali nilai ekspor ke Jepang dan Tiongkok yang mengalami kontraksi.

Komoditas ekspor barang luar negeri utama Jawa Barat pada tahun 2024 berdasarkan perannya terhadap ekspor barang luar negeri total adalah 1) Kendaraan dan Bagiannya (20,82 persen); 2) Mesin/Perlengkapan Listrik (15,57 persen); 3) Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (8,29 persen); 4) Barang-barang Rajutan (5,11 persen); 5) Alas kaki (4,92 persen); 6) Karet dan Barang dari Karet (3,89 persen); 7) Pakaian Jadi Bukan Rajutan (3,44 persen); 8) Serat Stafel Buatan (2,93 persen); 9) Kertas/Karton (2,53 persen); dan 10) Perhiasan / Permata (2,22 persen).

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Kebutuhan terhadap barang dan jasa seluruh entitas ekonomi di Jawa Barat tidak dapat seluruhnya dipenuhi dari output hasil produksi wilayah Jawa Barat. Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu alasan dilakukannya aktivitas permintaan barang dan jasa dari luar wilayah Jawa Barat yaitu luar provinsi dan luar negeri. Pemenuhan kebutuhan konsumsi antara untuk sektor bisnis dan konsumsi akhir serta investasi dapat dilakukan dengan impor barang dan jasa.

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen pengurang dalam PDRB Pengeluaran. Pengukuran potensi dan besaran produk domestik dilakukan dengan mengeluarkan komponen Impor Barang dan Jasa dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impor. Hasil pengurangan secara konsep sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Transaksi impor menjelaskan penambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari nonresiden. Tabel 16 di bawah ini menunjukkan perkembangan impor barang dan jasa Jawa Barat dalam lima tahun terakhir.

Selama tahun 2020—2024 komponen Impor Barang dan Jasa mengalami peningkatan secara nominal seiring meningkatnya aktivitas produksi yang membutuhkan bahan baku, di mana impor bahan baku memiliki kontribusi terbesar dalam impor Jawa Barat. Besaran impor total pada tahun 2020 pada posisi 857.711,88 miliar rupiah kemudian pada tahun 2024 mencapai 1.613.234,00 miliar rupiah dengan penambahan nilai selama kurun lima tahun sebesar 755.522,11 miliar rupiah. Sementara secara riil nilai komponen ini pada tahun 2020 sebesar 432.249,84 miliar rupiah dan pada

tahun 2024 telah mencapai 753.395,91 miliar rupiah atau terjadi penambahan nilai sebesar 321.146,07 miliar rupiah.

**Tabel 16 Perkembangan Impor Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Barat, 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Impor					
a. ADHB (miliar rupiah)	857.711,88	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.149,70	1.613.234,00
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	432.249,84	511.346,46	556.591,43	654.746,47	753.395,91
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB) ⁹	41,19	45,76	47,09	51,73	57,14
Pertumbuhan ¹⁰					
Total impor	-15,81	18,30	8,85	17,64	15,07

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Peranan Impor Barang dan Jasa selama tahun 2020—2024 terhadap perekonomian Jawa Barat memiliki tendensi yang meningkat. Selama periode lima tahun terakhir (2020-2024) peranan terbesar terjadi pada tahun 2024 sebesar 57,14 persen dan peranan terkecil pada tahun 2020 sebesar 41,19 persen. Komposisi impor mencapai 50 persen ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Jawa Barat memiliki ketergantungan yang besar terhadap komoditas dari luar provinsi dan luar negeri. Hal ini sejalan dengan karakteristik jenis impor Jawa Barat yaitu mayoritas merupakan impor bahan baku yaitu sebesar 78,21 persen pada tahun 2023, sementara pada tahun 2024 impor bahan baku memiliki kontribusi sebesar 77,96 persen.

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Kinerja komponen Impor Barang dan Jasa selama tahun 2020—2024 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi. Kontraksi cukup dalam terjadi di tahun 2020 sebesar 15,81 persen sebagai dampak melambatnya aktivitas produksi terdampak Pandemi Covid-19. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2021 sebesar 18,30 persen seiring dengan pemulihan aktivitas perekonomian. Pada tahun 2022, kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 8,85 persen akibat perang Rusia dan Ukraina yang berdampak signifikan terhadap perdagangan global. Adapun pada tahun 2023 mengalami pertumbuhan yang signifikan hingga 17,64 persen dan kembali melambat pada tahun 2024 sebesar 15,07 persen. Apabila dicermati, kinerja Komponen Impor Barang dan Jasa setiap periode selama lima tahun (2020-2024) memiliki pola yang sama dengan kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa.

Pertumbuhan impor yang tinggi di satu sisi bagi Jawa Barat dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di sisi *supply* karena mayoritas menggunakan bahan baku impor, tetapi di sisi lain menggambarkan ketergantungan yang besar terhadap produk luar Jawa Barat. Kebijakan pemerintah untuk aktivitas impor harus diarahkan untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan bahan baku impor agar tidak menjadi pengurang bagi perekonomian wilayah.

Distribusi impor luar negeri menurut klasifikasi *Broad Economic Categories* (BEC) yaitu menunjukkan kategori akhir penggunaan barang pada tahun 2024 yaitu (1) impor bahan baku sebesar 77,96 persen (2) impor barang modal sebesar 11,22 persen dan (3) impor barang konsumsi sebesar 10,82 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas impor luar negeri Jawa Barat didominasi oleh impor bahan baku sehingga ketika permintaan

terhadap ekspor barang meningkat maka akan memicu peningkatan aktivitas impor untuk memenuhi bahan baku atau barang modal.

Komoditas andalan impor barang luar negeri Jawa Barat berdasarkan peranannya terhadap total impor barang luar negeri pada tahun 2024 adalah 1) Mesin/Peralatan Listrik (13,38 persen); 2) Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (7,76 persen); 3) Kendaraan dan Bagiannya (7,74 persen); 4) Plastik dan Barang dari Plastik (6,92 persen); 5) Kain Rajutan (6,32 persen); 6) Filamen Buatan (5,86 persen); 7) Kapas (4,04 persen); 8) Bahan Kimia Anorganik (2,78 persen); 9) Serat Stafel Buatan (2,27 persen) dan 10) Perabot, Penerangan Rumah (1,90 persen). Kontribusi kesepuluh komoditas utama impor barang luar negeri Jawa Barat mencapai 59,35 persen dari total nilai impor barang luar negeri Jawa Barat.

Negara-negara importir utama Jawa Barat pada tahun 2024 dengan kontribusi terbesar berturut-turut adalah sebagai berikut: Tiongkok US\$3,75 miliar (28,70 persen); Jepang US\$1,85 miliar (14,18 persen); Korea Selatan US\$1,51 miliar (11,52 persen); Australia US\$1,42 miliar (10,90 persen); dan Taiwan US\$0,67 miliar (5,12 persen). Kelima negara asal impor ini berkontribusi hampir tiga perempat bagian dari total impor Jawa Barat atau sebesar 70,41 persen. Kinerja impor Jawa Barat yang berasal dari kelima negara memiliki pertumbuhan positif pada tahun 2024.

Neraca perdagangan Jawa Barat pada tahun 2024 mengalami surplus sebesar US\$24,80 miliar, lebih kecil dibandingkan surplus pada tahun 2023 sebesar US\$24,33 miliar. Surplus neraca perdagangan Jawa Barat terbesar pada tahun 2024 terjadi dengan negara Amerika Serikat, artinya ekspor Jawa Barat ke Amerika Serikat lebih besar dibandingkan dengan impor Amerika Serikat ke Jawa Barat dengan nilai yang sangat signifikan yaitu sebesar US\$5,90 miliar, dimana nilai ini lebih besar

dibandingkan surplus tahun 2023 yaitu sebesar US\$5,72 miliar. Adapun defisit neraca perdagangan Jawa Barat terbesar pada tahun 2024 terjadi dengan negara Tiongkok artinya ekspor Jawa Barat ke Tiongkok lebih kecil dibandingkan dengan impor Tiongkok ke Jawa Barat dengan nilai sebesar US\$1,85 miliar, lebih besar dibandingkan defisit tahun 2023 sebesar US\$0,90.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELOUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020-2024



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020-2024

Perekonomian global tahun 2024 masih dibayangi oleh ketidakpastian dan cenderung mengalami pelemahan. Pelemahan ekonomi global salah satunya ditandai oleh rata-rata nilai *Purchasing Manager's Index* (PMI) sektor manufaktur yang berada di bawah level 50 atau kontraksi sepanjang tahun 2024. Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia masih berdaya tahan dan mampu tumbuh positif sepanjang tahun 2024. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 tercatat sebesar 5,03 persen, sedikit lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi 2023. Tren perlambatan pertumbuhan ini adalah yang kedua kalinya pasca pandemi Covid-19, yakni di tahun 2023 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05 setelah di tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen. Sejalan dengan pola Nasional, laju perekonomian Jawa Barat yang merupakan provinsi penyangga Ibu Kota Negara pun masih mampu tumbuh positif di tahun 2024 dan mengalami tren perlambatan dua tahun berturut-turut. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2024 tercatat sebesar 4,95 persen, melambat dari pertumbuhan tahun 2023 yang sebesar 5,00 persen dan tahun 2022 yang tumbuh sebesar 5,45 persen. Kinerja positif ditunjukkan oleh hampir semua komponen pengeluaran yakni pengeluaran rumah tangga, lembaga nonprofit, pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, dan ekspor-impor.

Perubahan kinerja ekonomi tentunya berpengaruh terhadap perubahan pola dan struktur yang meliputi perbandingan atau rasio antar

komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB, dan nilai PDRB total. Demikian juga perbandingan antara nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca perdagangan. Indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari PDRB menurut pengeluaran. PDRB sisi pengeluaran mengukur nilai produk domestik dari sisi pengguna yaitu menggambarkan siapa pengguna produk barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah, yaitu rumah tangga, LNPRT, perusahaan, pemerintah, dan luar wilayah/luar negeri. Agregat PDRB pengeluaran ini merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah. Agregat tersebut merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu dari aktivitas keseluruhan ekonomi. Namun demikian, di dalam analisis perbandingan pengeluaran PDRB untuk permintaan akhir baik konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, PMTB dan Ekspor, masih termasuk sebagian produk yang berasal dari impor.

4.1 PERKEMBANGAN PDRB MENURUT PENGELOUARAN 2020-2024

Agregat PDRB pengeluaran menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah ekonomi domestik, yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan (konsep bruto). PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui pendekatan nilai tambah. Proses tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan dukungan berbagai faktor produksi serta sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian, nilai

tambah bruto yang sebagian besar menggambarkan balas jasa (kompensasi) atas faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal (kapital) dan keahlian (kewirausahaan), merupakan inti dari analisis PDRB.

PDRB menurut pengeluaran atau permintaan akhir menjelaskan tentang aspek konsumsi dan akumulasi, bukan aspek produksi. PDRB menurut pengeluaran menjelaskan sejumlah pengeluaran konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa. Dengan demikian, nilai PDRB ini dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas yang menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik. Namun, di dalam nilai agregat PDRB masih terkandung nilai penyusutan.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat perkembangan pemerataan suatu wilayah adalah melalui indikator nilai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan perbandingan antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Rangkaian data PDRB per kapita memberi gambaran rata-rata kemampuan setiap penduduk Jawa Barat dalam menciptakan nilai tambah bruto dari tahun ke tahun. Tabel 17 berikut memberikan gambaran perkembangan PDRB Jawa Barat baik atas dasar harga berlaku maupun konstan, serta perkembangan nilai per kapita dan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama lima tahun terakhir (2020—2024).

Tabel 17 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Nilai PDRB (miliar rupiah)					
- ADHB	2.082.107,26	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.225,72	2.823.338,73
- ADHK 2010	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93	1.669.421,49	1.752.071,20
PDRB per kapita (ribu rupiah)					
- ADHB	43.236,51	45.234,18	49.136,90	52.651,59	56.079,61
- ADHK 2010	30.180,54	30.935,23	32.246,78	33.481,96	34.801,16
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010 (persen)	-0,77	2,50	4,24	3,83	3,94
Jumlah penduduk (000 org)	48.156,23 ¹	48.738,81 ²	49.306,78 ²	49.860,33 ²	50.345,19 ²
Pertumbuhan Penduduk (%)	-1,77	1,21	1,17	1,12	0,97

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

¹Hasil Proyeksi Penduduk Interim

²Hasil Proyeksi SP2020

Pada saat terjadi pandemi Covid-19 di tahun 2020, perekonomian Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar -2,52 persen akibat terjadinya pembatasan aktivitas masyarakat. Pemulihan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi dimulai sejak triwulan II tahun 2021 setelah sebelumnya mengalami kontraksi selama empat triwulan berturut-turut. Di masa pemulihan tersebut, ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 3,74 persen atau masih di bawah rata-rata pertumbuhan sebelum pandemi Covid-19. Namun dalam dua tahun berikutnya, perekonomian Jawa Barat sudah kembali ke laju pertumbuhan normalnya, yaitu sebesar 5,45 persen di tahun 2022 dan 5,00 persen di tahun 2023. Memasuki tahun 2024, perekonomian Jawa Barat

mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 4,95 persen. Perlambatan pertumbuhan dialami oleh seluruh provinsi di Pulau Jawa, dan peningkatan perekonomian Jawa Barat di tahun 2024 lebih tinggi dari pada laju pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di masa pandemi *Covid-19* tahun 2020 PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 43.236,51 ribu rupiah dan meningkat menjadi sebesar 45.234,18 ribu rupiah di masa pemulihan pasca pandemi. Nilai PDRB per kapita Jawa Barat tahun 2021 telah mampu melebihi nilai PDRB per kapita sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* yang menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi berjalan cukup baik di Jawa Barat. Memasuki tahun 2022, nilai PDRB per kapita Jawa Barat meningkat menjadi 49.136,90 ribu rupiah dan terus meningkat di tahun 2023 menjadi sebesar 52.651,59 ribu rupiah. Selanjutnya di tahun 2024 nilai PDRB per kapita Jawa Barat terus meningkat mencapai nilai 56.079,61 ribu rupiah. Nilai PDRB per kapita tersebut adalah nilai yang diturunkan dari PDRB atas dasar harga berlaku yang dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga nilainya akan sangat dipengaruhi oleh perubahan volume produksi, perubahan harga, dan pertumbuhan jumlah penduduk. Berkaitan dengan kinerja ekonomi suatu wilayah yang diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil), maka nilai PDRB per kapita pun dapat diukur menggunakan PDRB atas dasar harga konstan, sehingga dapat diamati laju pertumbuhan riilnya.

Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Barat tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar 4,24 persen dan terendah pada tahun 2020 yakni terjadi penurunan sebesar -0,77 persen. Laju pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Barat pasca pandemi *Covid-19* meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2021 PDRB per kapita Jawa Barat

meningkat sebesar 2,50 persen dan meningkat lebih cepat di tahun 2022 sebesar 4,24 persen. Namun di tahun 2023, PDRB per kapita Jawa Barat tumbuh lebih lambat dibanding tahun 2022, yaitu sebesar 3,83 persen. Hal itu sejalan dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Selanjutnya di tahun 2024, meskipun laju pertumbuhan ekonomi masih mengalami perlambatan, laju pertumbuhan PDRB per kapita menunjukkan percepatan dengan tumbuh sebesar 3,94 persen.

Laju pertumbuhan nilai PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua hal yaitu nilai PDRB yang tercipta dan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan PDRB per kapita berbanding lurus dengan laju pertumbuhan nilai PDRB yang tercipta dan berbanding terbalik dengan laju peningkatan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat selama kurun lima tahun terakhir (2020—2024) cukup fluktuatif. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,77 persen. Penurunan jumlah penduduk tersebut merupakan dampak pandemi *Covid-19* yang mana di tahun tersebut terjadi perubahan jumlah penduduk akibat perpindahan penduduk dari wilayah sentra pendidikan sebagai akibat dari perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring, maupun wilayah industri sebagai akibat dari pengurangan jumlah pekerja, sebagai eksek penanganan pandemi *Covid-19* seperti *lockdown* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jumlah penduduk Jawa Barat meningkat sebesar 1,29 persen di tahun 2021, seiring dengan dibukanya kembali berbagai aktivitas ekonomi. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2021 adalah yang tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Memasuki tahun 2022, kenaikan jumlah penduduk Jawa Barat melambat sebesar 1,22 persen. Tren perlambatan laju pertumbuhan

jumlah penduduk berlajut di dua tahun berikutnya, yaitu 1,18 persen di tahun 2023 dan 1,13 persen di tahun 2024.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator perbandingan pengeluaran PDRB untuk konsumsi akhir rumah tangga terhadap ekspor memberikan gambaran mengenai seberapa besar hasil produk wilayah tersebut digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dan digunakan untuk ekspor. Perbandingan antara produk yang dikonsumsi oleh rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor ke luar wilayah, lebih jauh memberikan informasi mengenai rasio antara konsumsi rumah tangga dengan ekspor.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran yang terdiri atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga residen. Konsumsi ini meliputi konsumsi yang diperoleh dari pembelian dan perkiraan transaksi barter yaitu barang dan jasa yang diterima dari pihak lain, dan barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri. Sedangkan ekspor adalah barang dan jasa hasil produk wilayah tersebut yang digunakan oleh nonresiden wilayah tersebut.

Pada saat terjadinya pandemi *Covid-19*, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dalam negeri dan kebijakan *lockdown* di beberapa negara menyebabkan aktivitas produksi dan distribusi menjadi terhambat. Hal itu mengakibatkan roda perekonomian lebih banyak digerakkan oleh aktivitas konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga. Pada periode 2020, konsumsi rumah tangga Jawa Barat mencapai nilai 1.378.904,38 miliar rupiah. Nilai tersebut memberikan peranan sebesar 66,23 persen terhadap PDRB Jawa Barat. Di tahun 2021, nilai konsumsi

rumah tangga Jawa Barat meningkat sebesar 45.689,69 miliar rupiah, yaitu menjadi sebesar 1.424.594,08 miliar rupiah. Namun demikian, peranan konsumsi rumah tangga justru menurun menjadi 64,62 persen seiring dengan peningkatan peranan yang terjadi pada komponen pengeluaran lainnya. Pada periode 2021—2022 pemulihan ekonomi sudah terasa karena diberlakukannya berbagai pelonggaran aktivitas masyarakat, baik di dalam negeri maupun di negara lain. Hal itu mengakibatkan peran sektor-sektor produktif seperti investasi dan ekspor mulai kembali meningkat. Sedangkan pada periode 2023—2024, berbagai tantangan yang dihadapi baik pada skala global maupun lokal mengakibatkan perekonomian Jawa Barat kembali lebih banyak disokong oleh aktivitas konsumsi masyarakat, terlihat pada kontribusi konsumsi rumah tangga yang meningkat menjadi sebesar 65,81 persen di 2023 dan makin meningkat menjadi 66,20 persen di 2024.

Dalam lima tahun terakhir, perkembangan komponen ekspor total Jawa Barat memiliki pola yang sama dengan komponen pengeluaran rumah tangga. Pada periode 2020—2021, nilai ekspor total Jawa Barat baik ke luar negeri maupun ke provinsi lain mengalami peningkatan sebesar 208.564,57 miliar rupiah, yaitu dari 914.423,48 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 1.122.988,05 miliar rupiah di tahun 2021. Nilai ekspor total Jawa Barat di tahun 2021 sudah melebihi nilai sebelum pandemi *Covid-19*. Pada tiga tahun berikutnya, nilai ekspor total Jawa Barat terus meningkat, yakni menjadi sebesar 1.275.685,48 di tahun 2022, sebesar 1.458.144,90 miliar rupiah di tahun 2023, dan mencapai 1.711.448,42 miliar rupiah di tahun 2024. Meskipun dalam rentang lima tahun terakhir terjadi pola yang sama pada nilai konsumsi rumah tangga dengan ekspor total, rasio keduanya menunjukkan pola yang berbeda. Perbedaan tersebut ditimbulkan oleh perbedaan kenaikan nilai secara relatif pada kedua indikator tersebut.

Tabel 18 memberikan tren perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai ekspor total dalam kurun waktu 2020—2024. Nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat di tahun 2020 adalah sebesar 1,51 kali nilai ekspor total. Nilai perbandingan kedua komponen pengeluaran tersebut menunjukkan tren menurun setiap tahunnya selama lima tahun terakhir. Di tahun 2021 nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat adalah sekitar 1,27 kali nilai ekspor total dan menjadi sebesar 1,09 kalinya di tahun 2024. Hal itu menunjukkan bahwa penyediaan (*supply*) barang dan jasa yang diperuntukkan untuk memenuhi permintaan ekspor meningkat lebih cepat dibandingkan untuk memenuhi permintaan akhir berupa konsumsi akhir rumah tangga. Dengan kata lain, terjadi peningkatan yang cukup besar pada ekspor total Jawa Barat. Kondisi itu dapat pula dimaknai bahwa geliat ekonomi perlahan sudah kembali ke kondisi normal, terlihat pada mulai tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang berorientasi ekspor, baik ekspor luar negeri maupun ekspor ke provinsi luar Jawa Barat.

Tabel 18 Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	1.378.904,38	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.869.119,19
Ekspor Total (ADHB) (miliar rupiah)	914.423,48	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.144,90	1.711.448,42
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,51	1,27	1,23	1,18	1,09

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Tren rasio yang makin menurun merupakan indikasi positif bagi perkembangan ekspor Jawa Barat, yaitu perkembangan konsumsi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan nilai barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB merupakan rasio penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengamati berapa besar penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan investasi fisik secara relatif. Nilai PMTB diukur dengan total nilai perolehan dikurangi pelepasan aset tetap milik produsen selama periode neraca ditambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi.

Seperti yang telah diulas pada subbab sebelumnya, pola perkembangan nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat dari tahun 2020 hingga tahun 2024 selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Nilai konsumsi rumah tangga di tahun 2021 sudah lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian sebelum terjadinya pandemi. Pola serupa pun terjadi pada aktivitas investasi fisik berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada saat kondisi perekonomian anjlok karena hantaman pandemi Covid-19 di tahun 2020, nilai PMTB Jawa Barat masih mampu mencapai 489.180,23 miliar rupiah. Memasuki tahun 2021, nilai PMTB Jawa Barat meningkat menjadi sebesar 545.297,64 miliar rupiah seiring dengan mulainya masa pemulihan. Peningkatan nilai PMTB ini cukup signifikan jika

dibandingkan dengan tahun 2020, dan lebih cepat dari pada penambahan nilai konsumsi rumah tangga. Hal itu sangat erat terkait dengan kondisi sudah adanya pelonggaran aktivitas ekonomi di dalam maupun luar negeri dan meredanya kasus *Covid-19*, sehingga aktivitas produksi yang sempat terhenti dan investor yang menahan diri untuk berinvestasi mulai kembali ke pola normal secara perlahan.

Pada saat geliat ekonomi mulai meningkat, aktivitas investasi fisik pun perlahan mengikuti, hal itu terlihat pada nilai PMTB Jawa Barat yang kembali naik pada tahun 2022, mencapai nilai 576.895,25 miliar rupiah. Peningkatan nilai PMTB tersebut terus berlanjut di dua tahun berikutnya, yaitu menjadi sebesar 644.379,45 miliar rupiah di tahun 2023 dan sebesar 697.369,70 miliar rupiah di tahun 2024.

Membandingkan nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai PMTB secara periodik merupakan cara untuk memperoleh gambaran mengenai dinamika perkembangan penggunaan produk yang tersedia untuk memenuhi kedua komponen pengeluaran tersebut. Rasio yang meningkat bermakna bahwa alokasi penyediaan produk untuk memenuhi konsumsi akhir berupa konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi dari pada peningkatan alokasi untuk memenuhi kegiatan investasi fisik berupa PMTB. Tabel 19 berikut menunjukkan perkembangan rasio nilai konsumsi rumah tangga terhadap nilai PMTB Jawa Barat selama periode lima tahun terakhir.

Tabel 19 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Konsumsi RT (ADHB) (miliar rupiah)	1.378.904,38	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.869.119,19
Total PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	489.180,23	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,82	2,61	2,72	2,68	2,68

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Dalam periode 2020—2024 terlihat bahwa rasio nilai konsumsi rumah tangga terhadap nilai PMTB cukup fluktuatif. Pada tahun 2020 rasionya mencapai 2,82 yang bermakna bahwa nilai PDRB yang digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga di tahun 2020 adalah sebanyak 2,82 kali lipat nilai investasi fisik yang dilakukan. Rasio tersebut adalah yang tertinggi selama periode lima tahun terakhir, yang menandakan bahwa peran konsumsi rumah tangga dalam menggerakkan perekonomian Jawa Barat cukup tinggi di tengah lesunya aktivitas produksi dan inventasi. Tabel 19 juga menunjukkan bahwa pada tahun 2021 yang merupakan tahun pemulihan pasca pandemi, nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat sebesar 2,61 kali lipat nilai PMTB. Penurunan nilai rasio ini disebabkan oleh nilai PMTB meningkat lebih cepat dibandingkan nilai konsumsi rumah tangga yang antara lain disebabkan oleh mulai bergeraknya proyek-proyek investasi yang sempat tertunda baik di sisi pemerintah, swasta, maupun rumah tangga.

Memasuki tahun 2022, konsumsi masyarakat meningkat cukup signifikan, sedangkan nilai investasi fisik meningkat tidak setajam tahun sebelumnya, hal itu menyebabkan rasio konsumsi rumah tangga terhadap

nilai PMTB mengalami peningkatan di tahun tersebut. Tercatat nilai rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB Jawa Barat di tahun 2022 adalah sebesar 2,72. Namun peningkatan rasio tersebut tidak berlanjut di dua tahun berikutnya. Pada tahun 2023 nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat adalah sekitar 2,68 kali nilai PMTB atau sedikit menurun jika dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya. Hal itu menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan komponen PMTB. Di tahun 2024, perbandingan kedua komponen pengeluaran tersebut cenderung stagnan atau tidak terjadi perubahan rasio yang berarti. Di tahun tersebut perubahan nilai konsumsi rumah tangga cenderung sama dengan perubahan nilai PMTB, yakni nilai konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 8,18 persen dan nilai PMTB meningkat sebesar 8,22 persen. Berdasarkan rangkaian data sejak tahun 2010, rasio nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat terhadap nilai PMTB selalu berada di atas level 2. Hal itu menunjukkan masih sangat dominannya konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Jawa Barat dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya termasuk PMTB. Dengan demikian, apabila terjadi gangguan daya beli masyarakat, akan sangat berpengaruh pada pergerakan roda ekonomi Jawa Barat. Oleh sebab itu, langkah-langkah kebijakan yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat sangat penting untuk dilakukan. Hal itu sejalan dengan strategi APBN 2024 yang dijalankan oleh Pemerintah RI yang antara lain difokuskan pada pengendalian inflasi (stabilitas harga) dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir untuk menunjang aktivitas ekonomi di wilayah domestik, yang berasal dari produksi di wilayah domestik dan dari impor. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), dan pemerintah. Ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, namun sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Aktivitas konsumsi akhir tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk penambahan aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga, karena pengeluaran dengan jenis tersebut digolongkan ke dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai seluru aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh residen dalam satu wilayah pada suatu periode tertentu. Perbandingan antara nilai konsumsi akhir dengan nilai PDRB menghasilkan suatu rasio yang menunjukkan proporsi aktivitas konsumsi akhir pada suatu wilayah. Makin besar nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan makin besar porsi konsumsi akhir dalam perekonomian wilayah tersebut, yang bermakna bahwa makin besar pula ketergantungan perekonomian wilayah tersebut terhadap pengeluaran konsumsi akhir. Sebaliknya, makin kecil rasio menunjukkan makin besar porsi aktivitas investasi dan atau eksport di wilayah tersebut.

Tabel 20 Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Konsumsi Akhir (ADHB) (miliar rupiah)					
a. Rumah tangga	1.378.904,38	1.424.594,08	1.570.458,02	1.727.716,98	1.869.119,19
b. LNPRT	13.340,95	13.760,94	14.720,00	17.446,05	19.144,01
c. Pemerintah	116.666,16	122.043,06	123.350,23	133.626,98	138.068,37
Jumlah	1.508.911,49	1.560.398,08	1.708.528,25	1.878.790,01	2.026.331,56
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	2.082.107,26	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.225,72	2.823.338,73
Proporsi (%)	72,47	70,78	70,52	71,57	71,77

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Tabel 20 menggambarkan proporsi total konsumsi akhir yang dilakukan oleh rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir porsi pengeluaran akhir di dalam PDRB Jawa Barat adalah 71,42 persen, yang memiliki arti bahwa penggunaan konsumsi akhir hampir mencapai tiga perempat nilai PDRB yang tercipta. Perkembangan porsi konsumsi akhir terhadap PDRB dari tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung berfluktuasi. Rasio tertinggi terjadi di tahun 2020, yakni mencapai 72,47 persen, sebagai dampak tersendatnya aktivitas produktif seperti investasi dan ekspor di masa pandemi *Covid-19*. Pada periode pemulihan pasca pandemi, porsi konsumsi akhir di dalam PDRB Jawa Barat cenderung lebih rendah dari pada porsi di masa sebelum pandemi, yakni sekitar 70,78 persen di tahun 2021 dan menurun menjadi 70,52 persen di tahun 2022. Tren penurunan tersebut menggambarkan peran aktivitas

nonproduktif berupa kegiatan konsumsi di dalam perekonomian Jawa Barat makin kecil, sebaliknya peran aktivitas produktif seperti investasi dan perdagangan dengan luar wilayah baik luar negeri maupun provinsi lain makin membaik. Meningkatnya proporsi PDRB yang digunakan untuk kegiatan produksi memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat sebagai provinsi sentra industri dan penyumbang industri nasional. Di samping itu, Jawa Barat merupakan wilayah dengan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN yang cukup besar dibandingkan dengan provinsi lainnya.

Periode 2023 perekonomian global mengalami perlambatan sebagai imbas dari adanya ketegangan politik di beberapa negara, seperti perang Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan penyerangan Israel terhadap Gaza di Palestina. Hal itu turut mempengaruhi perekonomian Jawa Barat yang aktivitas produksinya banyak ditujukan untuk ekspor ke luar negeri dan pasokan bahan baku pun banyak yang berasal dari luar negeri. Namun demikian, paket kebijakan yang diambil pemerintah untuk stabilisasi ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, yang salah satunya berupa kebijakan Penebalan Bansos untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, cukup ampuh menjaga daya beli domestik. Hal itu memengaruhi perekonomian Jawa Barat sehingga masih tetap tumbuh walaupun melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu pun tercermin pada proporsi konsumsi akhir terhadap nilai PDRB Jawa Barat yang meningkat menjadi 71,57 persen di tahun 2023.

Memasuki tahun 2024, dunia masih berhadapan dengan tantangan yang kompleks dan beragam. Ketegangan geopolitik antara beberapa negara yang masih berlanjut, disertai oleh adanya pergantian kepemimpinan politik beberapa negara termasuk Indonesia turut mewarnai

dinamika pergerakan ekonomi di dalam negeri termasuk Jawa Barat. Di tahun ini Jawa Barat kembali mengalami perlambatan pertumbuhan. Aktivitas konsumsi akhir naik sedikit lebih cepat dari pada kenaikan aktivitas produktif seperti investasi dan ekspor impor, sehingga proporsi konsumsi akhir dalam perekonomian Jawa Barat kembali meningkat tipis menjadi sebesar 71,77 persen di tahun 2024.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Kegiatan ekspor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi baik atas dasar penjualan/pembelian, barter, hadiah atau hibah atas barang dan jasa antara residen dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kata lain, ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik. Proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan diekspor tentu saja melibatkan kapital di wilayah domestik, baik kapital yang berasal dari dalam wilayah tersebut maupun yang berasal dari impor. Di dalam PDRB, pembentukan kapital tercermin di dalam komponen PMTB. Oleh sebab itu, kegiatan ekspor sangat berkaitan dengan kegiatan PMTB.

Rasio nilai ekspor terhadap PMTB memberikan gambaran mengenai seberapa besar perbandingan produksi yang dihasilkan oleh suatu wilayah yang digunakan untuk aktivitas ekspor dengan yang ditujukan untuk aktivitas investasi. Jika ratio bernilai lebih dari 1 (satu), maka hal itu menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan lebih banyak digunakan untuk kegiatan ekspor daripada digunakan untuk investasi. Demikian pula sebaliknya, jika rasinya lebih kecil dari 1 (satu) maka memberi gambaran bahwa hasil produk wilayah lebih banyak digunakan untuk investasi dari pada untuk ekspor.

Tabel 21 menunjukkan bahwa selama periode lima tahun terakhir (2020—2024) rasio ekspor terhadap PMTB bernilai di atas 1, yang bermakna bahwa hasil produksi Jawa Barat yang digunakan untuk ekspor lebih besar dari pada untuk kegiatan investasi fisik. Tren rasio ekspor terhadap PMTB Jawa Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari sebesar 1,87 pada tahun 2020, kemudian meningkat ke level angka 2 di tahun 2021, yaitu sebesar 2,06. Pasca pandemi Covid-19 rasio ekspor Jawa Barat terhadap PMTB konsisten berada di atas level 2 persen. Dalam tiga tahun berikutnya rasio yang tercipta berturut-turut adalah sebesar 2,21 di tahun 2022, meningkat menjadi sebesar 2,26 di tahun 2023, dan meningkat cukup signifikan menjadi sebesar 2,45 di tahun 2024. Peningkatan rasio ini disebabkan oleh peningkatan nilai ekspor Jawa Barat yang selalu lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan nilai PMTB setiap tahun dalam periode 2020—2024.

**Tabel 21 Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB)
Provinsi Jawa Barat, 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	914.423,48	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.144,90	1.711.448,42
Total PMTB (ADHB) (miliar rupiah)	489.180,23	545.297,64	576.895,25	644.379,45	697.369,70
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,87	2,06	2,21	2,26	2,45

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Tabel 21 Menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 tidak menyebabkan turunnya rasio ekspor terhadap PMTB Jawa Barat. Hal itu memberikan gambaran bahwa penurunan aktivitas ekspor

tidak setajam penurunan aktivitas investasi fisik berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Aktivitas ekspor Jawa Barat masih memberikan respons yang bagus, beberapa komoditas ekspor justru mengalami peningkatan permintaan dari luar Jawa Barat, antara lain barang yang berkaitan dengan kesehatan seperti produk masker dan hasil industri kimia. Adapun penurunan aktivitas PMTB yang cukup tajam di masa pandemi di samping berkaitan dengan kegiatan impor barang modal, juga berkaitan dengan penundaan beberapa proyek strategis berupa proyek-proyek program Nasional seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Sementara itu, di masa pemulihan ekonomi yakni periode 2021—2022, kegiatan perekonomian mulai memberikan respons yang cukup baik terhadap kinerja ekspor dan PMTB. Sedangkan di 2023, meskipun aktivitas ekspor ke luar negeri mengalami penurunan, namun ekspor antar daerah menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Sementara itu di tahun 2024, aktivitas ekspor Jawa Barat menunjukkan kinerja yang sangat baik, di sisi lain kinerja investasi sedikit mengalami perlambatan. Hal itu menjadi penyebab naiknya rasio ekspor Jawa Barat terhadap PMTB yang cukup signifikan di tahun 2024.

Lonjakan kenaikan nilai ekspor menjadi dua kali lipat dari nilai PMTB sangat berkaitan erat dengan Jawa Barat sebagai wilayah dengan kontribusi perekonomian terbesar pada kategori industri pengolahan. Pada masa pandemi *Covid-19*, industri pengolahan yang merupakan lapangan usaha terbesar di Jawa Barat menjadi salah satu yang paling terimbas. Turunnya pertumbuhan lapangan usaha tersebut tentunya berdampak pada kinerja ekspor Jawa Barat. Salah satu langkah yang diambil pemerintah agar kinerja industri pengolahan tidak makin terpuruk adalah dengan memberikan insentif pada pelaku industri dengan harapan kinerja ekspor masih dapat

berjalan baik dan pengurangan tenaga kerja dapat ditekan seoptimal mungkin. Sementara itu, sisi investasi di masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang cukup tajam. Tertundanya beberapa proyek PMA maupun PMDN ditandai dengan turunnya nilai realisasi investasi.

Dalam tiga tahun terakhir realisasi investasi Jawa Barat yang berasal PMA maupun PMDN terus meningkat dan selalu tertinggi secara Nasional. Gairah investasi ini tentu saja diikuti oleh penambahan kapasitas produksi yang selanjutnya meningkatkan produksi barang dan jasa di Jawa Barat, yang tidak hanya digunakan oleh masyarakat Jawa Barat sendiri, namun juga untuk memenuhi permintaan dari luar negeri dan luar wilayah.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor, baik berupa barang maupun jasa. Selain itu, rasio perbandingan ini menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah domestik lain baik luar negeri maupun luar provinsi Jawa Barat. Rasio nilai PDRB terhadap nilai impor berbanding terbalik dengan tingkat ketergantungan tersebut. Artinya, makin kecil rasio menandakan ketergantungan terhadap impor yang makin tinggi, dan sebaliknya makin besar rasio menunjukkan ketergantungan terhadap produk impor yang tidak terlalu tinggi.

Pada Tabel 22 terlihat bahwa rasio PDRB terhadap impor Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tendensi yang makin menurun. Pada tahun 2020 rasio PDRB terhadap impor Jawa Barat bernilai sebesar 2,43 dan merupakan yang tertinggi dalam periode 2020—2024. Namun hal itu tidak menggambarkan peningkatan kemampuan Jawa Barat

untuk memenuhi kebutuhan domestik. Rendahnya ketergantungan Jawa Barat terhadap impor pada masa itu adalah sebagai akibat dari adanya pembatasan pergerakan manusia termasuk pembatasan aktivitas perdagangan antar negara karena pemberlakuan *lockdown* di sejumlah negara, sehingga pemenuhan permintaan domestik lebih banyak berasal dari produk domestik atau stok dari periode sebelumnya.

Pada saat situasi ekonomi mulai kembali normal, ketergantungan Jawa Barat terhadap produk impor, baik berupa impor barang konsumsi, barang modal, bahan baku, maupun jasa, terlihat belum berkurang bahkan cenderung makin meningkat. Hal itu terlihat pada menurunnya rasio nilai PDRB terhadap nilai impor Jawa Barat menjadi sebesar 2,19 pada tahun 2021 dan sebesar 2,12 pada tahun 2022.

Tabel 22 Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	2.082.107,26	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.225,72	2.823.338,73
Impor Total (ADHB) (miliar rupiah)	857.711,88	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.149,70	1.613.234,00
Rasio PDRB terhadap Impor	2,43	2,19	2,12	1,93	1,75

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Penurunan rasio PDRB terhadap nilai impor Jawa Barat terus berlanjut di dua tahun terakhir, bahkan sudah menyentuh level 1, yakni sebesar 1,93 di tahun 2023 dan 1,75 di tahun 2024. Hal itu menunjukkan ketergantungan Jawa Barat terhadap barang dan jasa yang berasal dari luar Jawa Barat makin meningkat melebihi kondisi sebelum pandemi *Covid-19*.

Penurunan rasio yang secara terus menerus ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan wilayah Jawa Barat terhadap produk impor yang berdampak terhadap aktivitas produksi domestik. Berdasarkan data impor barang luar negeri, nilai impor barang konsumsi Jawa Barat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan impor barang konsumsi tahun sebelumnya. Di sisi lain, impor barang luar negeri berupa bahan baku/penolong dan barang modal mengalami penurunan. Pemerintah dalam hal ini perlu merumuskan kebijakan untuk memajukan industri pengolahan yang berfokus pada substitusi produk-produk impor. Begitu pula dengan perilaku konsumsi masyarakat, harus diupayakan agar masyarakat lebih memilih untuk mengonsumsi produk lokal dari pada produk impor. Harga dan kualitas tentu saja menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan, sehingga hal itu hendaklah menjadi perhatian Pemerintah dan juga produsen.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Penyediaan adalah jumlah produk yang digunakan dalam kegiatan ekonomi yang berasal dari produksi domestik dan impor, sehingga penyediaan merupakan penjumlahan output domestik dengan impor. Dengan membandingkan nilai penyediaan domestik dengan permintaan dan nilai impor dengan permintaan, akan diperoleh suatu rasio yang dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah pada produk yang berasal dari impor. Dengan kata lain, ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23 menunjukkan bahwa pada periode lima tahun terakhir tendensi permintaan terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2020 permintaan Jawa Barat terhadap barang dan jasa adalah sebesar 2.939.819,14 miliar rupiah. Sedangkan di tahun 2021 terjadi peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa menjadi sebesar 3.213.532,57 miliar rupiah seiring dengan meredanya kasus *Covid-19*. Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2020 memperlihatkan hasil yang cukup menggembirakan. Hal itu terlihat pada kembali meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa hingga mencapai 3.563.601,30 miliar di tahun 2022.

Tabel 23 Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Penyediaan Total					
PDRB (ADHB) (miliar rupiah)	2.082.107,26	2.204.660,23	2.422.782,32	2.625.225,72	2.823.338,73
Percentase	70,82	68,61	67,99	65,90	63,64
Nilai Impor					
Total ADHB (miliar rupiah)	857.711,88	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.149,70	1.613.234,00
Percentase	29,18	31,39	32,01	34,10	36,36
Permintaan					
Total (miliar rupiah)	2.939.819,14	3.213.532,57	3.563.601,30	3.983.375,42	4.436.572,73
Percentase	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Memasuki tahun 2023, dunia masih menghadapi ketidakpastian yang mengakibatkan perlambatan kinerja ekonomi global. Hal itu tentu saja menjadi suatu ancaman bagi perekonomian di dalam negeri, termasuk Jawa Barat. Selain itu, siklus El Nino juga menjadi ancaman lain yang perlu

diwaspadai. Pemerintah merespons kondisi tersebut dengan mengeluarkan tiga paket kebijakan untuk melindungi stabilitas ekonomi pada akhir 2023 lalu. Paket kebijakan difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan melalui Kebijakan Penebalan Bansos, memperkuat UMKM melalui Kebijakan Percepatan Penyaluran Program KUR, dan meningkatkan keterjangkauan hunian melalui Kebijakan Penguatan Sektor Perumahan. Paket kebijakan Pemerintah Pusat tersebut bersama-sama dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah berpengaruh pada peningkatan permintaan barang dan jasa Jawa Barat selama tahun 2023. Tercatat permintaan Jawa Barat sepanjang 2023 mencapai 3.983.375,42 miliar rupiah atau naik sekitar 419.774,12 miliar rupiah jika dibandingkan dengan permintaan di tahun sebelumnya. Di tahun berikutnya pemintaan terhadap barang dan jasa di Jawa Barat kembali meningkat sebesar 453.197,31 miliar rupiah sehingga mencapai 4.436.572,73 miliar rupiah.

Untuk memenuhi permintaan, sebagian barang dan jasa harus didatangkan dari luar wilayah, baik dari luar negeri maupun dari provinsi lain. Sepanjang periode 2020—2024, pemenuhan permintaan Jawa Barat yang berasal dari impor berkisar antara 29 sampai dengan 36 persen dari nilai permintaan total. Persentase terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 29,18 persen. Pandemi Covid-19 kala itu berdampak pada turunnya nilai impor barang jasa, yang antara lain disebabkan oleh adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan larangan impor barang. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024 yaitu sebesar 36,36 persen. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, termasuk telah normalnya kembali kegiatan ibadah umrah dan haji. Hal itu tentu saja memberikan dampak pada peningkatan impor jasa.

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri maupun luar provinsi Jawa Barat (nonresiden) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut dengan ekspor neto. Apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor maka terjadi surplus, dan sebaliknya jika nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor maka terjadi defisit. Dilihat dari sisi arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya jika dalam posisi defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini kekuatan ekonomi suatu wilayah antara lain ditentukan oleh proses tersebut.

Selain berdasarkan gambaran posisi neraca perdagangan, kekuatan ekonomi dapat juga dinilai berdasarkan perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga, maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat bergantung pada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

**Tabel 24 Neraca Perdagangan Barang dan Jasa
Provinsi Jawa Barat, 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Nilai Ekspor (ADHB) (miliar rupiah)	914.423,48	1.122.988,05	1.275.685,48	1.458.144,90	1.711.448,42
Nilai Impor (ADHB) (miliar rupiah)	857.711,88	1.008.872,34	1.140.818,98	1.358.149,70	1.613.234,00
Net Ekspor (X - M) (miliar rupiah)	56.711,59	114.115,71	134.866,50	99.995,20	98.214,43
Rasio ekspor terhadap Impor	1,066	1,113	1,118	1,074	1,061

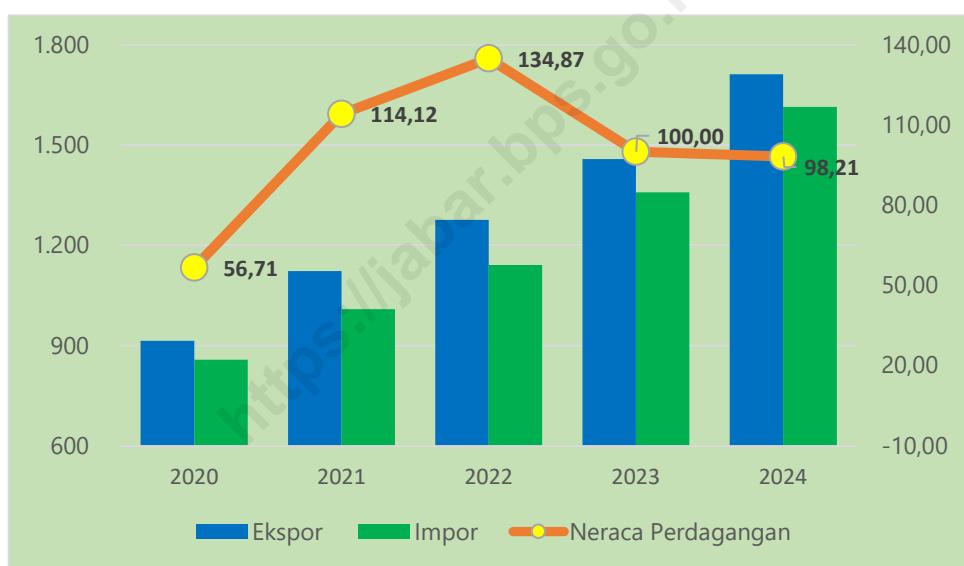
Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Tabel 24 menunjukkan neraca perdagangan Jawa Barat periode 2020-2024. Pada tabel tersebut terlihat bahwa posisi neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat dengan luar negeri dan dengan provinsi lain selalu bernilai positif, artinya perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat selalu berada dalam posisi surplus dalam lima tahun terakhir. Surplus terjadi karena aliran dana yang masuk, baik dari luar negeri dalam bentuk devisa maupun dari luar provinsi, lebih banyak dari pada aliran dana yang keluar dari Provinsi Jawa Barat.

Nilai surplus perdagangan Jawa Barat pada masa pandemi Covid-19 yakni pada tahun 2020 adalah sebesar 56.711,59 miliar rupiah yang berarti aliran devisa yang masuk lebih besar dari pada aliran devisa yang keluar dari Jawa Barat. Posisi surplus tersebut meningkat signifikan di tahun 2021 yakni mencapai 114.115,71 miliar rupiah atau lebih dari dua kali lipat nilai surplus yang dicapai pada tahun 2020. Di tahun 2022, surplus yang dihasilkan oleh neraca perdagangan Jawa Barat kembali meningkat, mencapai 134.866,50 miliar rupiah. Pada periode dua tahun berikutnya, meskipun neraca

perdagangan Jawa Barat dengan luar negeri dan provinsi lain masih mengalami surplus, namun memperlihatkan pola penurunan. Surplus perdagangan Jawa Barat pada tahun 2023 adalah sebesar 99.995,20 miliar rupiah dan turun menjadi sebesar 98.214,43 miliar rupiah di tahun 2024. Nilai surplus perdagangan di dua tahun terakhir tersebut lebih rendah dari nilai surplus yang dicapai pada masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Penurunan nilai surplus diakibatkan oleh peningkatan nilai eksport Jawa Barat yang tidak setinggi peningkatan nilai impornya. Kondisi neraca perdagangan Jawa Barat selama periode 2020—2024 secara lebih jelas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024

Selanjutnya, pengamatan terhadap neraca perdagangan dapat dilakukan dengan mengamati nilai rasio eksport terhadap impor pada setiap tahun. Tabel 24 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rasio eksport terhadap impor Jawa Barat selalu berada di atas angka

1 (satu), yang bermakna bahwa nilai ekspor pada periode tersebut lebih tinggi dari pada nilai impor. Rasio ekspor terhadap impor Jawa Barat tertinggi terjadi pada tahun 2022, yang mencapai 1,118 yang bermakna bahwa nilai ekspor Jawa Barat di tahun tersebut lebih tinggi sekitar 11,82 persen dari pada nilai impor Jawa Barat di tahun tersebut. Hal itu tentu saja merupakan capaian positif dalam perputaran perekonomian Jawa Barat. Nilai rasio ekspor terhadap impor tertinggi kedua dalam kurun lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2021, yakni mencapai 1,113 atau meningkat cukup signifikan dari pada rasio yang diperoleh pada tahun 2020 yang sebesar 1,066. Peningkatan nilai rasio ekspor terhadap impor sejak 2020 hingga 2022 menunjukkan bahwa nilai ekspor Jawa Barat meningkat jauh lebih cepat dari pada nilai impor.

Memasuki tahun 2023, meskipun rasio ekspor terhadap impor Jawa Barat masih di atas angka 1, rasio yang tercipta lebih rendah daripada rasio di tahun sebelumnya, yaitu sebesar 1,074. Hal itu menunjukkan terjadi peningkatan nilai impor yang lebih cepat daripada peningkatan nilai ekspor. Pola yang sama masih berlanjut hingga tahun 2024, rasio ekspor terhadap impor Jawa Barat menurun ke angka 1,061, bahkan angka ini adalah yang terendah sepanjang periode 2020—2024. Tentu saja hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah dan pelaku usaha, agar pola tersebut tidak terus berlanjut, bahkan turun ke level di bawah angka 1 di tahun-tahun mendatang.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan

menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 sampai dengan 1 (-1<RPI<1). Jika RPI bernilai di antara nol dan minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara nol dan positif 1, maka perdagangan internasional wilayah tersebut didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25 menggambarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri Provinsi Jawa Barat periode 2020—2024. Pada periode tersebut, posisi ekspor luar negeri Jawa Barat selalu lebih tinggi dari pada impor luar negeri dengan pola yang hampir sama setiap tahunnya. Nilai ekspor luar negeri Jawa Barat pada tahun 2020 tercatat sekitar 392.366,18 miliar rupiah. Di masa pemulihan pasca pandemi Covid-19, yakni tahun 2021 dan 2022, nilai ekspor luar negeri Jawa Barat mengalami peningkatan, masing-masing menjadi sebesar 488.180,25 miliar rupiah dan 577.852,16 miliar rupiah. Capaian nilai ekspor luar negeri di dua tahun tersebut sudah melampaui nilai ekspor luar negeri sebelum masa pandemi. Memasuki tahun 2023, kondisi global yang masih belum menentu akibat adanya konflik beberapa negara, kelangkaan energi, dan naiknya harga komoditas, menyebabkan nilai ekspor luar negeri Jawa Barat mengalami penurunan, yakni menjadi sebesar 563.521,35 miliar rupiah. Selanjutnya di tahun 2024, nilai ekspor luar negeri Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 44.284,10 miliar rupiah sehingga mencapai 607.805,45 miliar rupiah yang merupakan nilai ekspor luar negeri tertinggi dalam periode lima tahun terakhir.

Tabel 25 Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Barat, 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (miliar rupiah)	392.366,18	488.180,25	577.852,16	563.521,35	607.805,45
Nilai Impor LN, ADHB (M) (miliar rupiah)	163.821,06	199.808,17	242.819,21	211.420,88	237.095,15
(X – M) (miliar rupiah)	228.545,12	288.372,08	335.032,95	352.100,47	370.710,30
(X + M) (miliar rupiah)	556.187,24	687.988,42	820.671,36	774.942,24	844.900,60
R P I	0,41	0,42	0,41	0,45	0,44

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Perkembangan nilai impor luar negeri Jawa Barat memiliki pola yang hampir sama dengan dinamika nilai ekspor luar negerinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai impor luar negeri Jawa Barat pada tahun 2020 mencapai 163.821,06 miliar rupiah, kemudian meningkat cukup tinggi menjadi sekitar 199.808,17 miliar rupiah di tahun 2021 seiring dengan makin terbukanya akses perdagangan dengan luar negeri. Memasuki tahun 2022, nilai impor luar negeri Jawa Barat masih menunjukkan perkembangan yang cukup tinggi, yakni meningkat sekitar 21,53 persen dibandingkan dengan nilai impor luar negeri tahun sebelumnya. Nilai impor luar negeri Jawa Barat di tahun 2022 tercatat sebesar 242.819,21 miliar rupiah. Nilai impor di tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam masa lima tahun terakhir.

Selanjutnya di 2023, sebagaimana pola pada ekspor luar negeri, impor luar negeri Jawa Barat juga mengalami penurunan. Penurunan nilai impor luar negeri Jawa Barat jauh lebih tinggi dari pada penurunan nilai ekspor luar negerinya. Di tahun 2023 nilai impor luar negeri Jawa Barat tercatat sebesar 211.420,88 miliar rupiah atau menurun sekitar 12,93 persen

dibandingkan nilai impor luar negeri di tahun sebelumnya. Memasuki tahun 2024, nilai impor luar negeri Jawa Barat kembali meningkat, yakni mendapat 237.095,15 miliar rupiah. Secara persentase, peningkatan nilai impor luar negeri tersebut lebih tinggi dari pada peningkatan nilai ekspor luar negeri.

Dinamika nilai ekspor dan impor luar negeri menghasilkan suatu pola Rasio Perdagangan Internasional (RPI) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 25. Selama periode 2020—2024 terlihat bahwa RPI Jawa Barat bernilai positif setiap tahunnya dan cenderung berfluktuasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai RPI yang berada di antara nol dan positif 1 memiliki makna bahwa perdagangan internasional Jawa Barat selama kurun waktu tersebut didominasi oleh kegiatan ekspor. Pada periode lima tahun terakhir, nilai RPI Jawa Barat tertinggi terjadi pada tahun 2023, yaitu mencapai 0,45 dan yang terendah terjadi pada tahun 2022 dengan nilai RPI sebesar 0,41. Peningkatan nilai RPI mengandung makna bahwa kenaikan nilai impor luar negeri berada di bawah kenaikan nilai ekspor luar negeri, dan sebaliknya penurunan nilai RPI mengandung arti bahwa kenaikan impor luar negeri lebih tinggi dari pada kenaikan nilai ekspor luar negeri.

Nilai RPI di tahun 2021 lebih tinggi 0,01 poin jika dibandingkan dengan nilai RPI di tahun 2020 yakni meningkat dari sebesar 0,41 di tahun 2020 menjadi 0,42 di tahun 2021. Namun nilai RPI Jawa Barat kembali menurun 0,01 poin atau kembali ke posisi 0,41 di tahun 2022. Memasuki tahun 2023, nilai RPI Jawa Barat meningkat cukup tinggi yaitu menjadi 0,45 atau naik sekitar 0,04 poin jika dibandingkan dengan RPI tahun sebelumnya. Pada tahun tersebut baik nilai ekspor luar negeri maupun nilai impor luar negeri mengalami penurunan. Kenaikan nilai RPI di tahun 2023 menandakan bahwa penurunan nilai impor luar negeri lebih besar dari pada penurunan yang terjadi pada nilai ekspor luar negeri. Selanjutnya di tahun

2024, nilai RPI Jawa Barat menurun sebesar 0,01 poin jika dibandingkan dengan nilai RPI tahun 2023, yaitu sebesar 0,44. Meskipun sedikit menurun, nilai RPI Jawa Barat di tahun 2024 masih lebih tinggi dari pada nilai RPI di masa pandemi Covid-19 dan di masa pemulihan pasca pandemi. Seperti telah disinggung sebelumnya, pada tahun 2024 nilai ekspor luar negeri dan impor luar negeri Jawa Barat mengalami peningkatan. Nilai ekspor luar negeri meningkat sekitar 7,86 persen, sedangkan nilai impor luar negeri meningkat lebih tinggi yakni sebesar 12,14 persen. Peningkatan nilai impor luar negeri yang lebih cepat dari pada peningkatan ekspor luar negeri itulah yang menyebabkan nilai RPI Jawa Barat sedikit menurun di tahun 2024.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL VALUE ADDED RATIO (ICVAR)

Indikator *Incremental Capital Value Added Ratio* (ICVAR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*value added*) dari penggunaan investasi tersebut. ICVAR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan jumlah produksi yang dihasilkan. Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan nilai tambah dalam hal ini merupakan hasil aktivitas produksi berupa barang dan jasa yang dilakukan oleh residen suatu wilayah pada satu periode. Pendekatan ICVAR dan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) pada dasarnya sama dalam mengukur besarnya investasi yang terjadi. Dampak penambahan kapital terhadap penambahan *value added* (NTB) diukur menggunakan ICVAR, sedangkan dampak penambahan kapital terhadap penambahan output diukur menggunakan

ICOR. Penghitungan nilai ICVAR menggunakan indikator PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil).

ICVAR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap nilai tambah atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai tambah akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$ICVAR = \frac{\Delta K}{\Delta VA} = \frac{I}{VA} = \frac{I_t}{VA_t - VA_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

VA_t = PDRB ADHK tahun ke t

VA_{t-1} = PDRB ADHK tahun ke t-1

Secara teori, ICVAR biasanya bernilai positif. Makin kecil nilai ICVAR mengandung makna bahwa investasi yang dilakukan makin efisien karena makin cepat terjadi penambahan nilai tambah. Sebaliknya makin besar nilai ICVAR menunjukkan investasi yang dilakukan makin tidak efisien karena penambahan nilai tambah yang diperoleh dari penambahan kapital tersebut membutuhkan waktu yang lebih lama.

Nilai ICVAR Jawa Barat selama lima tahun terakhir cukup berfluktuasi seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 26. Pada tahun 2020 ICVAR Jawa Barat bernilai negatif, yaitu sebesar -8,95. Seperti yang telah diulas sebelumnya, tahun 2020 adalah tahun anomali, yakni pada saat itu terjadi kelesuan ekonomi yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang negatif (kontraksi). Kelesuan ekonomi tersebut bukan disebabkan oleh berkurangnya kapital yang terlibat di dalam perputaran ekonomi, namun karena adanya kebijakan pembatasan yang mengakibatkan kegiatan

produksi tidak dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas produksi kapital yang tersedia.

Selain itu, pada kenyataannya penambahan *value added* tidak hanya disebabkan oleh investasi. Dengan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi (penurunan *value added*), maka penambahan investasi menjadi tidak berarti karena tidak menyebabkan penambahan nilai tambah, sehingga penambahan investasi menjadi tidak efisien. Sedangkan di tahun-tahun selain 2020, nilai ICVAR Jawa Barat bernilai positif dengan nilai terkecil adalah pada tahun 2022 yakni sebesar 4,37 dan yang terbesar pada tahun 2021 yakni sebesar 6,58.

**Tabel 26 Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR)
Provinsi Jawa Barat, 2020-2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PDRB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93	1.669.421,49	1.752.071,20
$\Delta(PDRB_t - PDRB_{t-1})$ (miliar rupiah)	-37.578,96	54.365,67	82.238,54	79.436,56	82.649,71
PMTB (ADHK 2010) (miliar rupiah)	336.213,72	357.977,88	359.006,10	386.751,79	413.661,87
ICVAR	-8,95	6,58	4,37	4,87	5,01

Keterangan: *angka sementara

**angka sangat sementara

Pada saat pandemi Covid-19 di tahun 2020, nilai ICVAR Jawa Barat mengalami nilai negatif yakni sebesar -8,95, nilai tersebut meningkat cukup tinggi menjadi sebesar 6,58 pada masa pemulihan pasca pandemi yakni di tahun 2021. Pada masa pemulihan ini nilai ICVAR pun belum sepenuhnya menunjukkan tingkat efektivitas investasi karena ekonomi pada tahun tersebut masih dalam masa pemulihan di berbagai lini setelah sebelumnya dihantam pandemi.

Nilai ICVAR Jawa Barat di dua tahun pasca pandemi mulai menunjukkan perbaikan. Di tahun 2022 nilai ICVAR Jawa Barat turun 2,22 poin dari tahun sebelumnya atau menjadi sekitar 4,37. Setahun berikutnya, nilai ICVAR Jawa Barat meningkat 0,5 poin atau menjadi sebesar 4,87. Memasuki tahun 2024, nilai ICVAR Jawa Barat kembali menunjukkan peningkatan sebesar 0,14 poin atau menyentuh level angka 5, yakni menjadi sebesar 5,01.

Tendensi penurunan nilai ICVAR menunjukkan bahwa investasi makin efisien (Susilowati, dkk. 2012), dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya angka ICVAR menunjukkan bahwa investasi di Jawa Barat pada tahun tersebut makin tidak efisien apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat diperlakukan sama pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang sifat investasinya cepat dalam menghasilkan nilai tambah akan berbeda dengan lapangan usaha yang sifat investasinya lambat dalam menghasilkan nilai tambah. Atau dengan kata lain, efisiensi investasi lapangan usaha yang berteknologi padat karya akan sangat berbeda dengan efisiensi investasi pada lapangan usaha yang padat kapital.



PDRB MENURUT PENGELOUARAN PROVINSI JAWA BARAT

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat 2024: **4,95%**

PDRB 2024

Atas Dasar Harga Berlaku

Rp2.823,39 (Triliun)

Atas Dasar Harga Konstan

Rp1.752,07 (Triliun)

↑ 5,01%

Pengeluaran
Konsumsi
Rumah Tangga

↑ 7,89%

Pengeluaran
Konsumsi
LNPRT

↑ 1,39%

Pengeluaran
Konsumsi
Pemerintah

↑ 6,96%

Pembentukan
Modal Tetap
Bruto

↑ 5,39%

Eksport
Barang
dan Jasa

↑ 11,43%

Impor
Barang
dan Jasa

Struktur PDRB 2024

Konsumsi Rumah Tangga	66,20
Total Eksport	60,62
Total Impor	57,14
PMTB	24,70
Konsumsi Pemerintah	4,89
Net Eksport	3,48
Konsumsi LNPRT	0,68
Perubahan Inventori	0,05

Source of Growth 2024

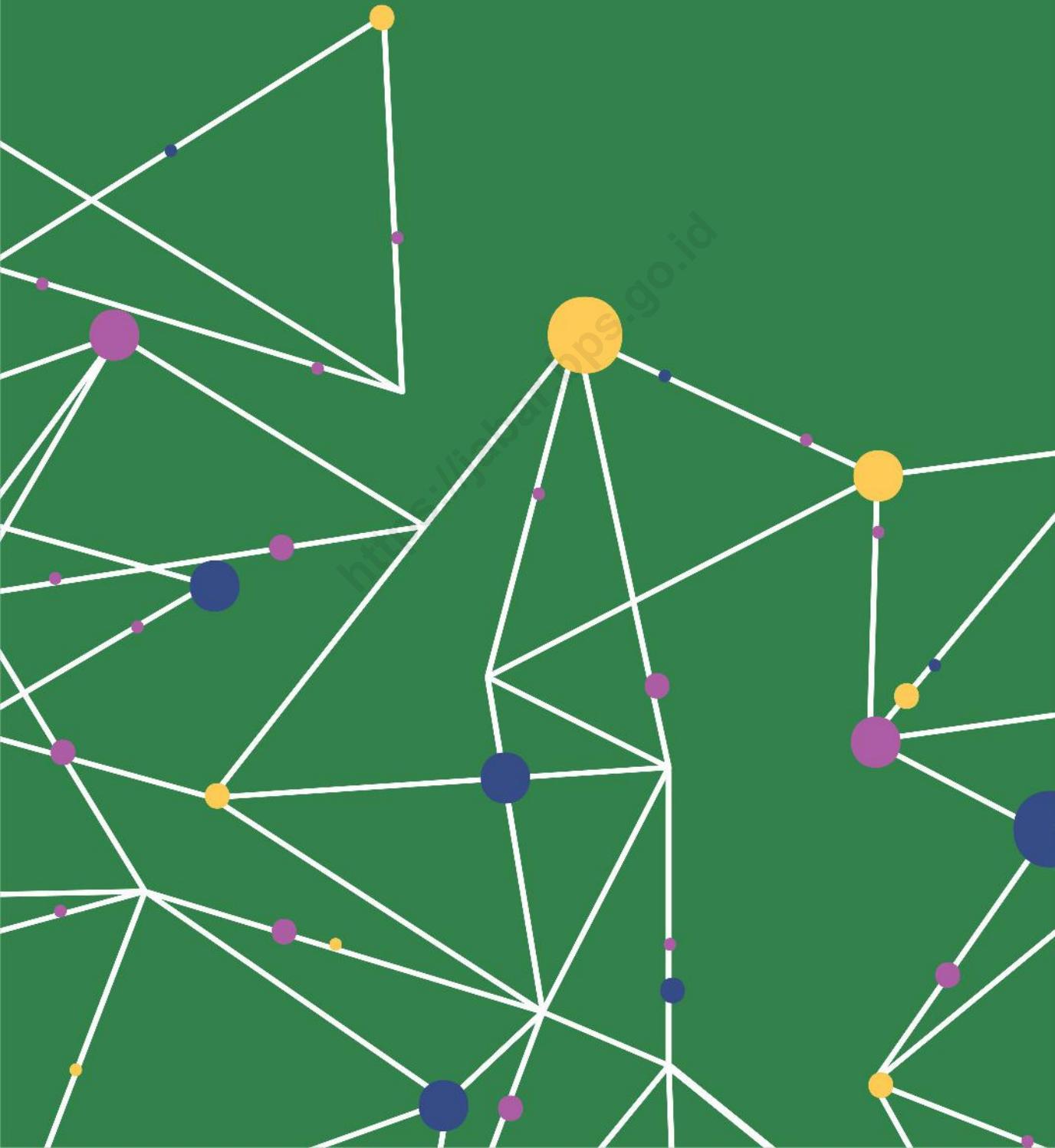


Series Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024



BAB V

PENUTUP



BAB V

PENUTUP

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan aktivitas perekonomian di tingkat regional (provinsi) pada suatu periode dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama yaitu SNNI 2010, dengan harapan hasil penghitungan PDRB akan konsisten dan memiliki keterbandingan secara wilayah.
2. PDRB menurut pengeluaran tahun 2020-2024 menggambarkan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Barat pada periode bersangkutan. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPR, pemerintah, dan perusahaan.
3. Data disajikan dalam bentuk *series* tahun 2020-2024, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain dan model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Secara langsung maupun tidak langsung dapat

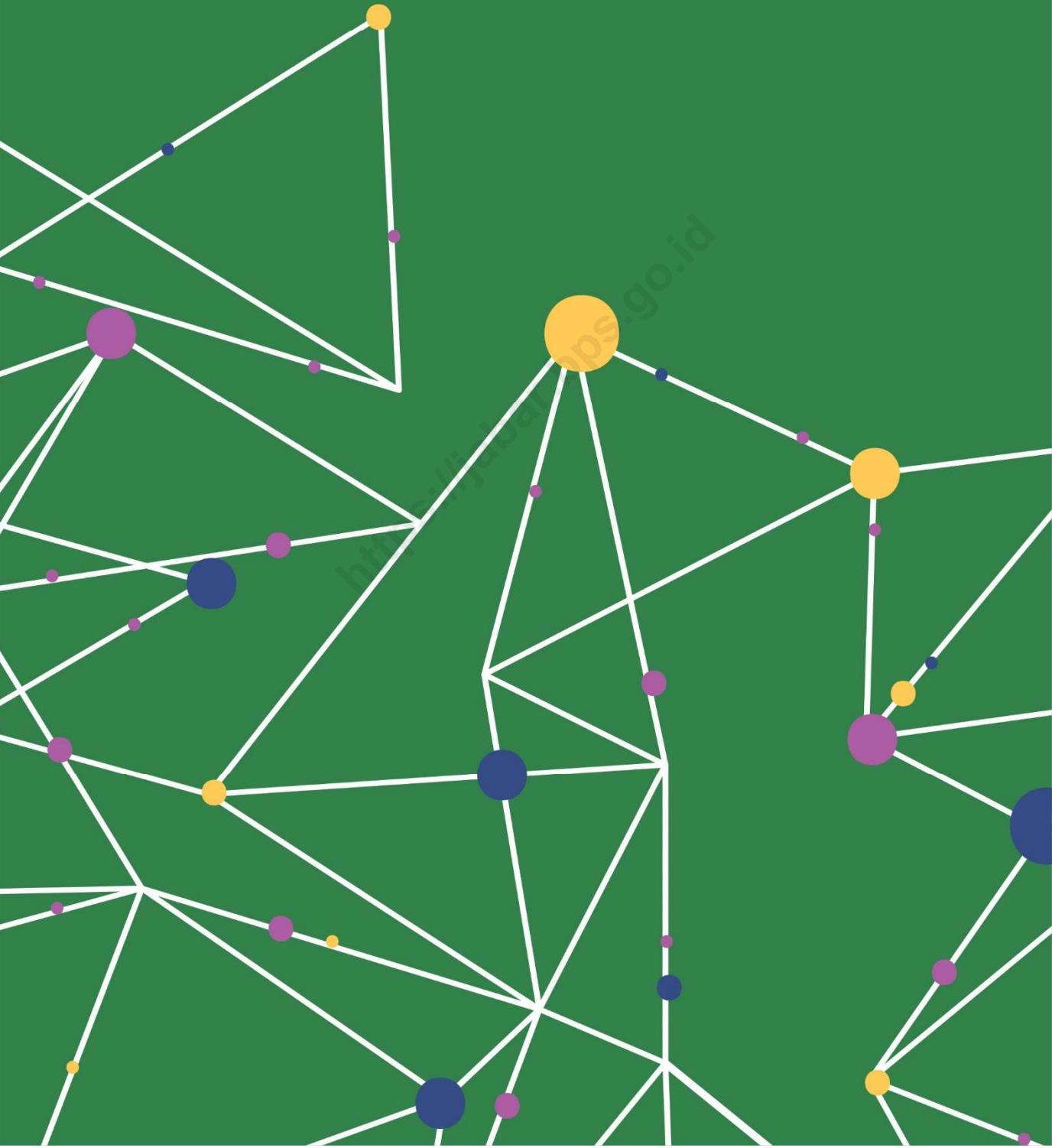
dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (*industry*), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan neraca perdagangan. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).
6. Penyajian Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024 menggunakan data-data pendukung berupa literatur, data sekunder dari berbagai institusi terkait serta fenomena ekonomi dan sosial dalam lingkup regional, nasional dan global yang relevan dengan data dan informasi yang disajikan.
7. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara keseluruhan tumbuh sebesar 4,95 persen melambat jika dibanding tahun sebelumnya sebesar 5,00 persen. Menurut komponen pengeluaran, kinerja positif didorong oleh komponen LNPRT, PMTB, PKRT, PKP dan ekspor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan. Penyajian Publikasi PDRB 2024 pada tahun 2024 dihadapkan pada perlambatan ekonomi khususnya di Jawa Barat hal ini dipengaruhi situasi global saat ini. Konflik geopolitik perang Rusia-Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah, perubahan kepemimpinan diperkirakan akan membawa perbedaan arah kebijakan di berbagai negara, hal ini menambah ketidakpastian dalam situasi global di mana tahun 2024 lebih dari 60 negara di dunia termasuk Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum dan proyeksi ekonomi global yang melemah.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2016. *Pedoman Penyusunan PDRB Kab/Kota Tahun Dasar 2010 menurut Pengeluaran*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Tim Penerjemah SNA 2008 Badan Pusat Statistik. 2008. *Sistem Neraca Nasional 2008*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- United Nations. 2009. *System of National Accounts 2008 (2008 SNA)*. New York: United Nations.

LAMPIRAN



Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (juta rupiah), 2020-2024

KOMPONEN PENGELUARAN	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	1.378.904.384,43	1.424.594.079,36	1.570.458.015,24	1.727.716.979,06	1.869.119.186,33
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	618.307.730,62	645.351.211,00	722.110.560,45	794.627.042,40	867.204.112,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	52.294.004,24	53.220.934,58	56.014.941,62	59.533.492,61	62.301.668,45
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	147.237.428,46	147.511.895,68	158.992.785,02	170.923.708,57	179.716.387,00
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	81.479.894,36	85.359.925,31	90.498.412,27	96.982.566,80	102.784.382,74
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	324.573.272,42	334.383.985,13	370.990.447,64	417.938.682,08	450.452.711,44
1.f. Hotel dan Restoran	80.914.006,46	82.993.599,86	90.628.409,04	99.625.412,46	109.208.416,25
1.g. Lainnya	74.098.047,87	75.772.527,80	81.222.459,21	88.086.074,13	97.451.508,17
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	13.340.952,35	13.760.940,05	14.720.003,54	17.446.049,95	19.144.006,30
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	116.666.157,98	122.043.055,86	123.350.229,20	133.626.984,48	138.068.365,11
3.a. Konsumsi Kolektif	69.534.193,00	66.564.857,70	66.901.982,25	74.677.457,55	78.633.545,03
3.b. Konsumsi Individu	47.131.964,98	55.478.198,17	56.448.246,95	58.949.526,93	59.434.820,08
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	489.180.230,19	545.297.644,40	576.895.248,13	644.379.454,91	697.369.701,45
4.a. Bangunan	392.849.743,34	436.960.103,24	452.921.787,92	498.215.796,30	537.204.574,65
4.b. NonBangunan	96.330.486,85	108.337.541,16	123.973.460,21	146.163.658,61	160.165.126,80
5. Perubahan Inventori	27.303.937,79	-15.151.196,70	2.492.323,71	2.061.053,31	1.423.047,02
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	392.366.180,59	488.180.246,18	577.852.157,63	563.521.352,17	607.805.449,07
6.a. Barang	386.395.164,70	483.922.222,18	572.741.592,94	557.572.703,71	600.350.064,67
6.b. Jasa	5.971.015,89	4.258.024,00	5.110.564,69	5.948.648,47	7.455.384,40
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	163.821.055,70	199.808.169,26	242.819.206,23	211.420.884,33	237.095.148,88
7.a. Barang	140.675.501,26	181.634.129,67	218.696.337,86	184.096.872,54	205.722.735,78
7.b. Jasa	23.145.554,44	18.174.039,59	24.122.868,38	27.324.011,79	31.372.413,10
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-171.833.530,35	-174.256.366,78	-200.166.450,60	-252.105.266,26	-272.495.874,73
8.a. Ekspor	522.057.296,17	634.807.801,56	697.833.321,88	894.623.547,15	1.103.642.973,33
8.b. Impor	693.890.826,52	809.064.168,34	897.999.772,49	1.146.728.813,41	1.376.138.848,06
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	2.082.107.257,28	2.204.660.233,11	2.422.782.320,62	2.625.225.723,29	2.823.338.731,66

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat (juta rupiah), 2020-2024

KOMPONEN PENGELUARAN	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	894.114.734,32	905.974.620,75	948.326.477,59	998.976.600,84	1.048.976.700,73
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	348.199.607,77	355.651.319,90	371.401.876,27	388.606.108,76	404.023.830,19
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	39.235.874,10	39.451.531,77	40.810.282,34	42.425.426,40	43.766.184,11
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	102.924.782,75	102.116.003,58	106.309.920,78	111.517.583,14	116.714.395,02
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	58.130.996,09	60.816.954,18	62.744.431,16	65.341.199,31	67.621.316,91
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	236.636.286,94	238.521.074,46	253.710.218,97	271.599.296,76	290.149.049,33
1.f. Hotel dan Restoran	60.063.377,21	60.490.275,67	63.522.522,96	67.394.599,39	72.073.054,08
1.g. Lainnya	48.923.809,44	48.927.461,19	49.827.225,12	52.092.387,08	54.628.871,09
2. Pengeluaran Konsumsi LNPT	8.971.941,67	9.144.601,20	9.430.846,38	10.752.887,43	11.601.206,26
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	71.414.931,64	73.136.388,59	71.969.801,34	76.081.301,71	77.136.193,51
3.a. Konsumsi Kolektif	42.580.175,66	39.706.340,91	38.950.354,02	42.435.824,97	43.753.877,76
3.b. Konsumsi Individu	28.834.755,98	33.430.047,68	33.019.447,33	33.645.476,74	33.382.315,76
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	336.213.717,51	357.977.877,04	359.006.097,34	386.751.785,01	431.661.871,96
4.a. Bangunan	273.128.302,27	289.078.286,66	283.279.745,56	300.865.002,03	322.129.981,75
4.b. NonBangunan	63.085.415,24	68.899.590,39	75.726.351,78	85.886.782,97	91.531.890,21
5. Perubahan Inventori	16.198.450,45	-8.456.843,44	1.390.514,71	1.117.330,70	750.321,62
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	262.232.452,38	318.560.076,79	357.666.536,88	346.147.488,88	364.810.521,55
6.a. Barang	258.900.026,42	316.221.030,94	354.977.626,82	343.134.063,31	361.115.483,55
6.b. Jasa	3.332.425,96	2.339.045,85	2.688.910,06	3.013.425,57	3.695.038,00
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	115.244.558,07	141.550.806,37	161.581.709,01	140.124.541,91	156.143.614,04
7.a. Barang	102.838.302,29	131.771.792,42	149.304.993,38	126.722.718,73	141.118.512,93
7.b. Jasa	12.406.255,78	9.779.013,94	12.276.715,63	13.401.823,18	15.025.101,11
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-20.520.947,06	-7.039.524,42	3.776.361,07	-10.281.361,38	-8.721.997,60
8.a. Ekspor	296.484.332,33	362.756.134,18	398.786.079,20	504.340.561,77	588.530.299,96
8.b. Impor	317.005.279,38	369.795.658,60	395.009.718,13	514.621.923,15	597.252.297,56
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1.453.380.722,84	1.507.746.390,14	1.589.984.926,31	1.669.421.491,28	1.752.071.204,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen),
2020-2024**

KOMPONEN PENGELUARAN	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	66,23	64,62	64,82	65,81	66,20
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	29,70	29,27	29,81	30,27	30,72
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,51	2,41	2,31	2,27	2,21
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,07	6,69	6,56	6,51	6,37
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,91	3,87	3,74	3,69	3,64
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	15,59	15,17	15,31	15,92	15,95
1.f. Hotel dan Restoran	3,89	3,76	3,74	3,79	3,87
1.g. Lainnya	3,56	3,44	3,35	3,36	3,45
2. Pengeluaran Konsumsi LNPT	0,64	0,62	0,61	0,66	0,68
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	5,60	5,54	5,09	5,09	4,89
3.a. Konsumsi Kolektif	3,34	3,02	2,76	2,84	2,79
3.b. Konsumsi Individu	2,26	2,52	2,33	2,25	2,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	23,49	24,73	23,81	24,55	24,70
4.a. Bangunan	18,87	19,82	18,69	18,98	19,03
4.b. NonBangunan	4,63	4,91	5,12	5,57	5,67
5. Perubahan Inventori	1,31	-0,69	0,10	0,08	0,05
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	18,84	22,14	23,85	21,47	21,53
6.a. Barang	18,56	21,95	23,64	21,24	21,26
6.b. Jasa	0,29	0,19	0,21	0,23	0,26
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	7,87	9,06	10,02	8,05	8,40
7.a. Barang	6,76	8,24	9,03	7,01	7,29
7.b. Jasa	1,11	0,82	1,00	1,04	1,11
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-8,25	-7,90	-8,26	-9,60	-9,65
8.a. Ekspor	25,07	28,79	28,80	34,08	39,09
8.b. Impor	33,33	36,70	37,06	43,68	48,74
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 4 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat (persen),
2020-2024**

KOMPONEN PENGELUARAN	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	61,52	60,09	59,64	59,84	59,87
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	23,96	23,59	23,36	23,28	23,06
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,70	2,62	2,57	2,54	2,50
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,08	6,77	6,69	6,68	6,66
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,00	4,03	3,95	3,91	3,86
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	16,28	15,82	15,96	16,27	16,56
1.f. Hotel dan Restoran	4,13	4,01	4,00	4,04	4,11
1.g. Lainnya	3,37	3,25	3,13	3,12	3,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,62	0,61	0,59	0,64	0,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	4,91	4,85	4,53	4,56	4,40
3.a. Konsumsi Kolektif	2,93	2,63	2,45	2,54	2,50
3.b. Konsumsi Individu	1,98	2,22	2,08	2,02	1,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	23,13	23,74	22,58	23,17	23,61
4.a. Bangunan	18,79	19,17	17,82	18,02	18,39
4.b. NonBangunan	4,34	4,57	4,76	5,14	5,22
5. Perubahan Inventori	1,11	-0,56	0,09	0,07	0,04
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	18,04	21,13	22,49	20,73	20,82
6.a. Barang	17,81	20,97	22,33	20,55	20,61
6.b. Jasa	0,23	0,16	0,17	0,18	0,21
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	7,93	9,39	10,16	8,39	8,91
7.a. Barang	7,08	8,74	9,39	7,59	8,05
7.b. Jasa	0,85	0,65	0,77	0,80	0,86
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-1,41	-0,47	0,24	-0,60	-0,50
8.a. Ekspor	20,40	24,06	25,08	30,21	33,59
8.b. Impor	21,81	24,53	24,84	30,83	34,09
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen),
2020-2024**

KOMPONEN PENGELUARAN	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	-0,64	3,31	10,24	10,01	8,18
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,89	4,37	11,89	10,04	9,13
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-4,66	1,77	5,25	6,28	4,65
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	0,58	0,19	7,78	7,50	5,14
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,96	4,76	6,02	7,16	5,98
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	-7,88	3,02	10,95	12,65	7,78
1.f. Hotel dan Restoran	-2,62	2,57	9,20	9,93	9,62
1.g. Lainnya	2,19	2,26	7,19	8,45	10,63
2. Pengeluaran Konsumsi LNPT	-2,12	3,15	6,97	18,52	9,73
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	-0,67	4,61	1,07	8,33	3,32
3.a. Konsumsi Kolektif	-4,36	-4,27	0,51	11,62	5,30
3.b. Konsumsi Individu	5,34	17,71	1,75	4,43	0,82
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	-7,94	11,47	5,79	11,70	8,22
4.a. Bangunan	-5,54	11,23	3,65	10,00	7,83
4.b. NonBangunan	-16,59	12,46	14,43	17,90	9,58
5. Perubahan Inventori	-62,75	-155,49	116,45	-17,30	-30,96
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	-9,09	24,42	18,37	-2,48	7,86
6.a. Barang	-8,78	25,24	18,35	-2,65	7,67
6.b. Jasa	-25,50	-28,69	20,02	16,40	25,33
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	-14,84	21,97	21,53	-12,93	12,14
7.a. Barang	-11,74	29,12	20,40	-15,82	11,75
7.b. Jasa	-29,81	-21,48	32,73	13,27	14,82
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	28,27	-1,41	-14,87	-25,95	-8,09
8.a. Ekspor	1,94	21,60	9,93	28,20	23,36
8.b. Impor	-7,69	16,60	10,99	27,70	20,01
PDRB	-1,93	5,89	9,89	8,36	7,55

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen),
2020-2024**

KOMPONEN PENGELUARAN	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	-2,89	1,33	4,67	5,34	5,01
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	0,74	2,14	4,43	4,63	3,97
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-7,92	0,55	3,44	3,96	3,16
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-0,85	-0,79	4,11	4,90	4,66
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1,94	4,62	3,17	4,14	3,49
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	-8,44	0,80	6,37	7,05	6,83
1.f. Hotel dan Restoran	-4,83	0,71	5,01	6,10	6,94
1.g. Lainnya	-2,34	0,01	1,84	4,55	4,87
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-4,08	1,92	3,13	14,02	7,89
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	-1,15	2,41	-1,60	5,71	1,39
3.a. Konsumsi Kolektif	-4,85	-6,75	-1,90	8,95	3,11
3.b. Konsumsi Individu	4,86	15,94	-1,23	1,90	-0,78
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	-8,33	6,47	0,29	7,73	6,96
4.a. Bangunan	-5,96	5,84	-2,01	6,21	7,07
4.b. NonBangunan	-17,33	9,22	9,91	13,42	6,57
5. Perubahan Inventori	-62,85	-152,21	-116,44	-19,65	-32,85
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	-9,42	21,48	12,28	-3,22	5,39
6.a. Barang	-9,15	22,14	12,26	-3,34	5,24
6.b. Jasa	-26,59	-29,81	14,96	12,07	22,62
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	-13,05	22,83	14,15	-13,28	11,43
7.a. Barang	-10,64	28,13	13,31	-15,12	11,36
7.b. Jasa	-28,91	-21,18	25,54	9,16	12,11
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	73,93	65,70	153,65	-372,26	15,17
8.a. Ekspor	-1,88	22,35	9,93	26,47	16,69
8.b. Impor	-16,77	16,65	6,82	30,28	16,06
PDRB	-2,52	3,74	5,45	5,00	4,95

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Lampiran 7 Perkembangan Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto
(2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2020-2024**

KOMPONEN PENGELUARAN	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	154,22	157,24	165,60	172,95	178,19
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	177,57	181,46	194,43	204,48	214,64
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	133,28	134,90	137,26	140,33	142,35
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	143,05	144,46	149,56	153,27	153,98
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	140,17	140,36	144,23	148,42	152,00
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	137,16	140,19	146,23	153,88	155,25
1.f. Hotel dan Restoran	134,71	137,20	142,67	147,82	151,52
1.g. Lainnya	151,46	154,87	163,01	169,10	178,39
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	148,70	150,48	156,08	162,25	165,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	163,36	166,87	171,39	175,64	178,99
3.a. Konsumsi Kolektif	163,30	167,64	171,76	175,98	179,72
3.b. Konsumsi Individu	163,46	165,95	170,95	175,21	178,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	145,50	152,33	160,69	166,61	168,58
4.a. Bangunan	143,83	151,16	159,88	165,59	166,77
4.b. NonBangunan	152,70	157,24	163,71	170,18	174,98
5. Perubahan Inventori	168,56	179,16	179,24	184,46	189,66
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	149,63	153,25	161,56	162,80	166,61
6.a. Barang	149,24	153,03	161,35	162,49	166,25
6.b. Jasa	179,18	182,04	190,06	197,40	201,77
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	142,15	141,16	150,28	150,88	151,84
7.a. Barang	136,79	137,84	146,48	145,28	145,78
7.b. Jasa	186,56	185,85	196,49	203,88	208,80
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	837,36	2475,40	-5.300,51	2.452,06	3.124,24
8.a. Ekspor	176,08	175,00	174,99	177,38	187,53
8.b. Impor	218,89	218,79	227,34	222,83	230,41
PDRB	143,26	146,22	152,38	157,25	161,14

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Lampiran 8 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat (persen), 2020-2024

KOMPONEN PENGELOUARAN	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	2,32	1,96	5,32	4,44	3,03
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	2,13	2,19	7,15	5,17	4,97
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,54	1,22	1,75	2,24	1,44
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1,44	0,98	3,53	2,48	0,46
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2,96	0,14	2,76	2,91	2,41
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	0,61	2,21	4,31	5,23	0,89
1.f. Hotel dan Restoran	2,33	1,85	3,99	3,61	2,50
1.g. Lainnya	4,65	2,25	5,26	3,73	5,50
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,05	1,20	3,72	3,95	1,71
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	0,49	2,15	2,71	2,48	1,91
3.a. Konsumsi Kolektif	0,51	2,66	2,46	2,45	2,13
3.b. Konsumsi Individu	0,46	1,53	3,01	2,49	1,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	0,43	4,69	5,49	3,68	1,18
4.a. Bangunan	0,45	5,09	5,77	3,57	0,71
4.b. NonBangunan	0,90	2,97	4,12	3,95	2,82
5. Perubahan Inventori	0,27	6,29	0,04	2,91	2,82
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	0,37	2,42	5,43	0,77	2,34
6.a. Barang	0,41	2,54	5,43	0,71	2,31
6.b. Jasa	1,47	1,60	4,41	3,86	2,21
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	-2,07	-0,70	6,46	0,40	0,64
7.a. Barang	-1,24	0,77	6,27	-0,82	0,35
7.b. Jasa	-1,27	-0,38	5,73	3,76	2,41
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	175,18	195,62	-314,13	-146,26	27,41
8.a. Ekspor	3,89	-0,61	-0,00	1,37	5,72
8.b. Impor	10,92	-0,05	3,91	-1,98	3,40
PDRB	0,60	2,07	4,21	3,20	2,47

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. PHH Mustafa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat
Telp. (022) 7272595; (022) 7201696; Faks.: (022) 7213572
E-Mail : bps3200@bps.go.id
Website : <http://jabar.bps.go.id>

